

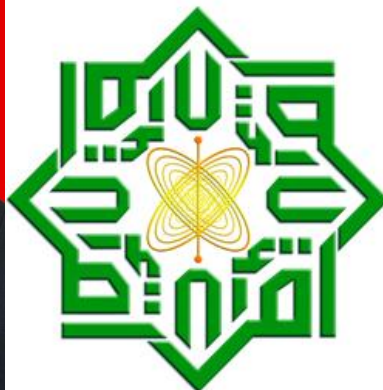


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB  
PAJAK USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM)  
DALAM MEMBAYAR PAJAK SESUAI PP NO. 23  
TAHUN 2018 PADA UMKM DI KABUPATEN  
INDRAGIRI HILIR (INHIL)**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial  
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*



UIN SUSKA RIAU

Oleh:

**M. RAMA**  
**NIM. 11473102208**

**JURUSAN AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM  
RIAU  
2019**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI**

NAMA : M. RAMA  
NIM : 11473102208  
FAKULTAS : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
JURUSAN : AKUNTANSI S1  
KONSENTRASI : PERPAJAKAN  
SEMESTER : XI  
JUDUL : FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) DALAM MEMBAYAR PAJAK SESUAI PP NO. 23 TAHUN 2018 PADA UMKM DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR (INHIL)

Disetujui Oleh  
Pembimbing



**ANDRI NOVIUS, SE, M.SI, AK, CA**  
NIP. 19781125 200710 1 003

Dekan  
Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial

Ketua Jurusan  
Prodi Akuntansi



**Dr. Dr. H. MUH SAID, HM, M.Ag, MM**  
NIP. 19620512 198903 1 003

**NASRULLAH DJAMIL, SE, M.Si, Ak, CA**  
NIP. 19780808 200710 1 003

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI**

NAMA : M. RAMA  
NIM : 11473102208  
FAKULTAS : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
JURUSAN : AKUNTANSI S1  
KONSENTRASI : PERPAJAKAN  
SEMESTER : XI  
JUDUL : FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN  
WAJIB PAJAK USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH  
(UMKM) DALAM MEMBAYAR PAJAK SESUAI PP NO. 23  
TAHUN 2018 PADA UMKM DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR  
(INHIL)

HARI/TANGGAL UJIAN : KAMIS / 26 DESEMBER 2019

PANITIA PENGUJI

KETUA



**PROF. Dr. LENY NOFIANTI, MS, SE, M.SI, AK**  
NIP. 197511121999032 001

ANGGOTA

PENGUJI I



**Dr. MULIA SOSADY, SE, MM.Ak**  
NIP. 197612172009011 014

PENGUJI II



**KHAIRIL HENRY, SE, M.Si. Ak**  
NIP. 19751129 2008011 009

UIN SUSKA RIAU





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

# FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) DALAM MEMBAYAR PAJAK SESUAI PP NO. 23 TAHUN 2018 PADA UMKM DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR (INHIL)

OLEH : M. RAMA

NIM.11473102208

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan dan pemahaman, sanksi denda, dan kualitas pelayanan fiskus terhadap kepatuhan membayar pajak pada sektor usaha mikro kecil dan menengah. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 99 orang responden yang merupakan pemilik usaha mikro kecil dan menengah yang berada di wilayah kabupaten Indragiri Hilir.

Hasil dalam penelitian ini dikumpulkan melalui kuesioner yang diproses dan dianalisis dengan menggunakan analisis regresi berganda. Metode yang digunakan dalam penentuan sampel dalam penelitian ini adalah *convenience sampling*. Uji kualitas data yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji validitas *pearson correlation* dan uji reliabilitas menggunakan *cronbach Alpha*. Untuk uji hipotesis dalam penelitian ini, peneliti menggunakan uji  $R^2$  yang sudah disesuaikan, uji F, dan uji t.

Hasil data penelitian ini menunjukkan bahwa semua variabel berpengaruh secara signifikan seperti kesadaran wajib pajak, pengetahuan dan pemahaman, sanksi denda, dan kualitas pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak pada sektor usaha mikro kecil dan menengah dengan nilai signifikansi masing – masing sebesar 0,000, 0,013, 0,000, 0,001. Akan tetapi dilakukan pengujian secara bersama – sama, semua variabel berpengaruh secara signifikan dan nilai signifikansi sebesar 0,000.

Kata kunci: kesadaran wajib pajak, pengetahuan dan pemahaman, sanksi denda, kualitas pelayanan fiskus, kepatuhan membayar pajak.

UIN SUSKA RIAU



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh.

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia Nya serta Salawat dan Salam atas junjungan kita Nabi Muhammad SAW sehingga penulis diberikan kemampuan untuk menyelesaikan skripsi ini dengan judul **Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Dalam Membayar Pajak Sesuai PP No. 46 Tahun 2013 pada UMKM di Kabupaten Indragiri Hilir (INHIL)**". Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan guna mencapai gelar sarjana lengkap pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Jurusan Akuntansi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam skripsi ini, untuk itu segala kritik dan saran yang membangun akan penulis terima dengan tangan terbuka. Penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, dorongan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Khususnya ku persembahkan skripsi ini kepada Ayahku Mursidi dan Ibu ku tercinta Asmahlaili, yang dengan sabar selalu member semangat, nasehat, kasih sayang, selalu berkorban demi anaknya. Terimakasih atas semua yang telah kalian berikan kepada penulis, ayah dan ibu selalu menjadi seorang

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

motivator yang sangat berarti yang sangat Istimewa dalam hidup penulis. Kini tibalah saat yang ayah, ibu dan penulis nanti salama ini yaitu gelar sarjana yang penuh dengan perjuangan.

2. Bapak Prof. Dr. Akhmad Mujahidin, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Dr. Drs. H. Muh. Said, HM, M.Ag, MM, Selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Riau.
4. Bapak Nasrullah Djamil, S.E, M.Si, AK, CA, Selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau.
5. Bapak Alchudri, S.E, MM, CPA, AK. dan ibu Astuti Meflinda, S.E, M.M. Selaku Penasehat Akademis yang telah memberikan arahan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Andri Novius S.E, M.Si. Ak. dan Ibu Arie Noer Wahidah, S.E, MM Selaku Pembimbing yang telah meluangkan waktu dan memberikan arahan dan masukan kepada penulis untuk menyusun dan menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak-bapak dan Ibu-ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau yang telah membagikan ilmu pengetahuan yang mereka miliki kepada penulis selama mengikuti perkuliahan di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau.
8. Segenap karyawan dan tatausaha Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah sabar dan ikhlas telah membantu penulis dalam segala hal urusan di kampus.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9. Terima kasih untuk adik-adik ku M. Ardiyansah, Zanaria Wati, dan adik-adik yang lain yang tak penulis sebutkan namanya. yang tak bosan-bosannya memberikan semangat kepada penulis agar segera mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi.
10. Terima kasih juga untuk teman-teman seperjuangan terutama kepada Tim 7 Ahmad Dani, Darma Agus Putra, Ramsal, Tio Irzanop Pajar, Tato Hariono, Zainudin dan teman-teman seperjuangan dan teman-teman Akuntansi 2014, lokal Accounting A 14 dan Tax Accounting A 14 yang selalu memberi dukungan kepada penulis, dimana kalian semua telah memberikan dorongan dan semangat yang sangat berarti kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda atas segala bantuan, semangat, motivasi, kasih sayang, perhatian dan dukungan yang telah penulis terima, penulis mengucapkan ribuan terimakasih atas bantuannya selama ini kepada penulis. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis dan pembaca sekalian.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh.*

Pekanbaru, 30 Januari 2019

Penulis

M. RAMA

NIM.11473102208





### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

## DAFTAR ISI

ABSTRAK .....	i
KATA PENGHANTAR .....	ii
DAFTAR ISI .....	v
DAFTAR TABEL .....	x
DAFTAR GAMBAR .....	xi
BAB I PENDAHULUAN .....	1
I. Latar Belakang .....	1
1.1 Rumusan Masalah .....	9
1.2 Tujuan Penelitian .....	9
1.3 Manfaat Penelitian .....	10
1.4 Sistematika Penulisan .....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	12
2.1. Pajak .....	12
2.2. Fungsi perpajakan .....	13
2.3. Sistem Pemungutan Pajak .....	13
2.4. Manfaat Perpajakan .....	15
2.5. Usaha Mikro Kecil Dan Menengah .....	20
2.5.1. Usaha Mikro .....	20
2.5.2. Usaha Kecil .....	21
2.5.3. Usaha Menengah .....	23
2.7. Model Pajak Umkm .....	25
2.8. Kebijakan Pph Umkm .....	27
2.9. Sistem Perhitungan Pph Umkm Pp No. 46 Tahun 2013 .....	28



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.10. Pph Orang Pribadi .....	28
2.11. Pph Badan .....	29
2.12. Kepatuhan Membayar Pajak .....	30
2.13. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak .....	31
2.13.1. Kesadaran Wajib Pajak .....	31
2.13.2. Pengetahuan Dan Pemahaman Wajib Pajak .....	33
2.13.3. Sanksi Denda .....	35
2.13.4. Kualitas Pelayanan Fiskus .....	38
2.14. Pajak Dalam Pandangan Islam .....	39
2.15. Penelitian Terdahulu .....	41
2.16. Kerangka Konseptual .....	43
2.17. Pengembangan Hipotesis .....	44
2.17.1. Kesadaran Membayar Pajak Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Umkm .....	44
2.17.2. Pengetahuan Dan Pemahaman Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Umkm .....	44
2.17.3. Sanksi Denda Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm .....	45
2.17.4. Kualitas Pelayanan Fiskus Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm .....	46
2.17.5. Kesadaran, Pengetahuan Dan Pemahaman, Sanksi Denda, Serta Kualitas Pelayanan Fiskus Berpengaruh Terhadap Wajib Pajak Umkm .....	47
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>49</b>
3.1. Jenis Penelitian .....	49



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

3.2. Lokasi Dan Waktu Penelitian .....	49
3.3. Populasi Dan Sampel .....	49
3.3.1. Populasi.....	49
3.3.2. Sampel.....	49
3.4. Jenis Dan Sumber Data .....	50
3.4.1. Data Primer .....	50
3.4.2. Data Sekunder .....	51
3.5. Metode Pengumpulan Data.....	51
3.6. Operasional Variabel Dan Pengukuran Variabel.....	51
3.6.1. Variabel Dependensi.....	52
3.6.2. Variabel Independen .....	52
3.7. Metode Analisis Data .....	55
3.7.1. Statistik Deskriptif.....	55
3.7.2. Uji Validitas .....	55
3.7.3. Uji Realibilitas .....	56
3.7.4. Uji Normalitas.....	56
3.7.5. Uji Asumsi Klasik .....	57
3.7.6. Uji Multikolinieritas.....	57
3.7.7. Uji Heteroskedastisitas .....	58
3.8. Pengujian Hipotesis .....	59
3.8.1. Uji Regresi Linear Berganda.....	59
3.8.2. Uji Parsial (Uji T) .....	60
3.8.3. Uji Simultan (Uji F) .....	60

UIN SUSKA RIAU





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.8.4. Uji Koefisien Determinasi .....	61
<b>BAB IV PEMBAHASAN.....</b>	<b>62</b>
4.1. Gambaran Umum Objek Penelitian .....	62
4.1.1. Tempat Dan Waktu Penelitian .....	62
4.1.2. Karakteristik Profil Responden .....	68
4.2. Hasil Uji Instrumen Penelitian .....	73
4.2.1. hasil uji statistic deskriptif .....	73
4.2.2. Hasil Uji Kualitas Data .....	74
4.3. Hasil Uji Asumsi Klasik .....	77
4.3.1. Hasil Uji Multikoloneritas .....	77
4.3.2. Hasil Uji Normalitas .....	78
4.3.3. Hasil Uji Heteroskedastisitas .....	78
4.4. Hasil Uji Hipotesis .....	79
4.4.1. Hasil Uji Koefisien Determinasi .....	79
4.4.2. Hasil Uji T.....	80
4.4.3. Hasil Uji Simultan (Uji F).....	84
4.5. Pembahasan.....	85
4.5.1 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kemaun Membayar Pajak Pada Sektor Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Umkm .....	85
4.5.2. Pengetahuan Dan Pemahaman Terhadap Pp No. 23 Tahun 2018 Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Pada Sektor Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Umkm .....	86
4.5.3. Pengaruh Sanksi Denda Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Pada Sektor Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umkm) .....	88



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.5.4. Pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Pada Sektor Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Ukm) .....	89
4.5.5. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Dan Pemahaman, Sanksi Denda, Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Pada Sektor Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Ukm) .....	91
BAB V PENUTUP .....	92
5. Kesimpulan .....	92
5.1. Keterbatasan Penelitian.....	93
5.2. Saran .....	94



# Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta dilindungi Undang-Undang  
Sultan Syarif Kasim Riau

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jumlah UMKM Kabupaten Indragiri Hilir .....	5
Tabel 2.1	Kriteria Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) .....	25
Tabel 2.2	Penelitian Terdahulu .....	41
Tabel 3.1	Operasional Variabel dan Pengukuran Variabel .....	55
Tabel 4.1	Jenis Usaha Mikro Kecil dan Menengah .....	63
Tabel 4.2	Nama dan Jenis Usaha Mikro Kecil dan Menengah .....	64
Tabel 4.3	Data Sampel Penelitian .....	66
Tabel 4.4	Hasil Uji Deskripsi Responden Berdasarkan Umur .....	67
Tabel 4.5	Hasil Uji Deskripsi Berdasarkan Jenis Kelamin .....	67
Tabel 4.6	Hasil Uji Deskripsi Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir .....	68
Tabel 4.7	Hasil Uji Deskripsi Responden Berdasarkan Lama Usaha .....	69
Tabel 4.8	Hasil Uji Deskripsi Responden Berdasarkan Keuntungan Usaha Setiap Bulan .....	70
Tabel 4.9	Hasil Uji Statistik Deskriptif .....	71
Tabel 4.10	Hasil Uji Validitas .....	73
Tabel 4.11	Hasil Uji Reliabilitas .....	74
Tabel 4.12	Hasil Uji Multikoloneritas .....	75
Tabel 4.13	Hasil Uji Koefisien Determinasi .....	78
Tabel 4.14	Hasil Uji T Statistik .....	79
Tabel 4.15	Hasil Uji Simultan .....	82

UIN SUSKA RIAU



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Model Perpajakan Umkam.....	25
Gambar 2.2. Piramida Attude to Compliance .....	27
Gambar 2.3. Kerangka konseptual.....	43
Gambar 4.1 Hasil Uji Normalitas Menggunakan Grafik P-Plot .....	77
Gambar 4.2 Hasil Uji Heteroskedastisitas Menggunakan Grafik Scatterplot.....	77



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **LATAR BELAKANG**

Peraturan perundangan-undangan perpajakan yang mengatur tentang pajak penghasilan yang berlaku sejak 1 Januari 1984 adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983. Sebelum tahun 1983, pengenaan pajak yang berhubungan dengan penghasilan diistilahkan dengan nama: pajak perseroan (Ord. pps 1925), pajak kekayaan (Stb. 1932), pajak pendapatan (Ord. ppd 1944), pajak penjualan (UU No. 19 Drt Th. 1951).

Dengan makin pesatnya perkembangan sosial ekonomi sebagai hasil pembangunan nasional dan globalisasi serta reformasi di berbagai bidang, maka perlu dilakukan perubahan undang-undang tersebut guna meningkatkan fungsinya dan perannya dalam rangka mendukung kebijakan pembangunan nasional khususnya di bidang ekonomi. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan telah beberapa kali diubah dan disempurnakan, yaitu dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 dan yang terakhir adalah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.

Perubahan undang-undang pajak penghasilan tersebut dilakukan dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip perpajakan yang dianut secara universal, yaitu keadilan, kemudahan/efisiensi administrasi dan produktifitas penerimaan Negara serta tetap mempertahankan sistim *self assessment* merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak (WP) untuk menghitung/memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pajak yang seharusnya terutang berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan, oleh karena itu tujuan dan arah penyempurnaan Undang-Undang pajak penghasilan tersebut adalah sebagai berikut: lebih meningkatkan keadilan pengenaan pajak, lebih memberikan kemudahan kepada wajib pajak, lebih memberikan kesejahteraan administrasi perpajakan, lebih memberikan kepastian hukum, konsistensi, dan transparansi, lebih menunjang kebijakan pemerintah dalam rangka meningkatkan daya saing dalam menarik investasi langsung di Indonesia baik penanaman modal asing maupun penanaman modal dalam negeri di bidang-bidang usaha tertentu dan daerah-daerah tertentu yang mendapat prioritas.

Menurut Jayanto (2011) Perjalanan reformasi pajak di Indonesia telah melewati masa lebih dari 20 tahun lamanya. Reformasi pajak dilakukan mengingat peran migas dalam penerimaan negara menjadi semakin berkurang dan tidak dapat lagi diandalkan sebagai sumber penerimaan dalam APBN. Hal ini menyebabkan pajak menjadi pemasok utama dana bagi pemerintah dalam membiayai segala pengeluaran-pengeluarannya. Saat ini sekitar 80% dana APBN berasal dari penerimaan pajak. Hal ini menjadi suatu bukti bahwa penerimaan pajak telah menjadi tulang punggung penerimaan negara yang dapat diandalkan.

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu bagian terpenting dalam perekonomian kerakyatan di suatu wilayah maupun suatu Negara. Usaha Mikro Kecil dan Menengah sangat berperan dalam perekonomian Indonesia, sebagai contoh Usaha Mikro Kecil dan Menengah sangat berperan penting pada saat terjadinya krisis moneter tahun 1998 dan dipandang sebagai



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

suatu penyelamat dalam proses perekonomian Indonesia, mendorong laju pertumbuhan ekonomi maupun penyerapan tenaga kerja. (Rahmatika, 2010)

Pada tahun 2013 pemerintah juga membuat kebijakan pajak yaitu perturan pemerintah (PP) Nomor 46 tahun 2013 yang diterapkan mulai 1 Juli 2013. PP ini memberikan tariff pajak sebesar 1% dan omset wajib pajak yang tidak melebihi 4,8 miliar dalam satu tahun masa pajak. PP ini dibuat pemerintah supaya wajib pajak semakin patuh, kemudian terdorong untuk melaksanakan kewajiban perpajakan sehingga target penerimaan pajak dapat tercapai. Namun realisasinya, pemerintah pajak setelah diberlakukannya tariff 1% dari omset belum mencapai target, Pada bulan Jani 2018, pemerintah kembali meluncurkan kebijakan baru tentang perpajakan UMKM yang tertuang dalam PP No 23 tahun 2018. Tarif pajak yang berlaku bagi UMKM dalam PP tersebut 0,5% dan mulai berlaku per 1 Juli 2018. Kebijakan ini bertujuan untuk mestimulus bisnis UMKM, mendorong peran serta masyarakat dan pengetahuan perpajakan. ( shitia, 2018)

Apabila diperhatikan dengan lebih seksama, selama ini perekonomian dalam negeri secara umum masih buruk, tetapi harus kita akui bahwa beberapa sektor usaha (terutama sektor swasta), masih menunjukkan kinerja yang cukup bagus. Usaha yang bisa dikatakan bertahan hidup dalam segala situasi dan kondisi tersebut kebanyakan adalah Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

Banyaknya usaha-usaha tersebut, baik yang berskala kecil maupun menengah dengan sungguh-sungguh merupakan sumber pajak yang dapat dipergunakan untuk menambah pendapatan Negara. Salah satu faktor yang mendasari Negara berkembang memandang pentingnya keberadaan Usaha Mikro

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kecil dan Menengah, dikarenakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah mampu menyerap banyak tenaga kerja. Dalam melakukan suatu usaha, perkembangan usaha di pengaruhi oleh beberapa faktor, baik faktor internal maupun faktor eksternal, salah satu faktor internal yang sangat berperan besar dalam mempengaruhi perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah adalah modal untuk investasi maupun untuk modal kerja.

Pekanbaru (antarariau.com) Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Provinsi Riau dari waktu ke waktu terus meningkat disebabkan makin tumbuhnya kesadaran menjadi wirausaha akibat belum seimbangnya jumlah pencari kerja dan lapangan kerja yang tersedia.

Jumlah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) se-Kabupaten Indragiri Hilir (INHIL) yang terdaftar resmi di Dinas Koperasi (Diskop) dan UMKM Inhil mencapai 8.378 usaha. Berdasarkan data terakhir per-september 2015, secara keseluruhan se-Inhil ada 8.378 UMKM, ”kata Kepala Diskop dan UMKM Kabupaten Inhil R. Rida Indaryanti melalui Kabid UMKM, Sumiati kepada awak media, kemarin. Dari total jumlah tersebut, dapat dibagi perkecamatan. (Detikriau,2016)

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Tabel 1.1**  
**Jumlah UMKM Di Kabupaten Indragiri Hilir**

No.	Nama Kec.	Jumlah UMKM
1	Tembilahan	4.620
2	Tembilahan Hulu	494
3	Tempuleng	375
4	Batang Tuaka	129
5	Gaung Anak Serka	144
6	Gaung	124
7	Kempas	158
8	Keritang	153
9	Kemuning	126
10	Rete	175
11	Sungai Batang	102
12	Enok	196
13	Kuindra	123
14	Tanah Merah	321
15	Mandah	174
16	Concong	140
17	Pelangeran	63
18	Kateman	474
19	Pulau Burung	184
20	Teluk Belengkong	103
	<b>Total</b>	<b>8.378</b>

Sumber: Dinas Kop & UMKM INHIL TAHUN ( 2017 )

Dari data diatas dapat dilihat, bahwa jumlah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) meningkat dari tahun ke tahun, Direktorat Jendral Pajak berkeyakinan bahwa pelaku UMKM wajib dikenai pajak penghasilan. Birokrasi dan administrasi perpajakan juga wajib dibenahi, hal tersebut dikerenakan banyak perilaku ketidakpatuhan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan akibat mengalami kesulitan dalam memahami administrasi perpajakan. Menyadari hal ini, Indonesia sejak awal berupaya untuk membangun kepatuhan wajib pajak. (Detikriau.org, 2016)



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan penelitian terdahulu, Wicaksono (2016) membuktikan bahwa kesadaran, pengetahuan dan pemahaman, sanksi denda serta kualitas pelayanan fiskus berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Jayanto (2011) membuktikan bahwa kesadaran wajib pajak, pengetahuan dan pemahaman berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan sanksi denda dan kualitas pelayanan fiskus tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Dikarenakan modal merupakan faktor kendala utama yang selalu menjadi masalah klasik dalam membangun usaha khususnya Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Tidak sedikit pemilik Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang belum sadar dan belum mematuhi dalam melakukan pembayaran pajak, khususnya pendaftaran untuk mempunyai Nomor Pokok Wajib pajak (NPWP) sampai ke dalam pembayaran pajak terhutang.

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi rendahnya kesadaran kewajiban perpajakan oleh pemilik Usaha Mikro Kecil dan Menengah diantaranya adalah rendahnya pendidikan para pemilik Usaha Mikro Kecil dan Menengah, kurangnya usaha peraturan oleh pihak aparat pajak. Ketidaktaatan dalam membayar pajak tidak hanya terjadi pada lapisan pengusaha saja tetapi pihak fiskus juga tidak taat untuk membayar pajak. Pemungutan pajak memang bukan suatu pekerjaan yang mudah di samping peran serta aktif dari petugas perpajakan, juga dituntut kesadaran dari para wajib pajak itu sendiri. Pengetahuan dan pemahaman penting bahwa wajib pajak mengetahui dan memahami Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 2018. Serta sanksi denda karena sanksi denda menjadi

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

suatu jaminan yang pasti agar peraturan tersebut dapat ditaati dan dipatuhi oleh wajib pajak, serta kualitas pelayanan fiskus dapat diartikan sebagai cara petugas pajak dalam mengurus atau menyiapkan segala keperluan yang dibutuhkan seseorang dalam hal wajib pajak. (Rahmatika, 2010)

Pajak bagi wajib pajak, baik perseorangan maupun badan usaha seringkali dirasakan sebagai beban. Oleh sebab itu peran dan partisipasi seluruh masyarakat Indonesia tanpa memandang dari golongan manapun sangat dibutuhkan demi kelancaran reformasi perpajakan. Titik berat dalam keberhasilan reformasi perpajakan adalah menumbuhkan tingkat kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak untuk melakukan perwujudan pengabdian dan peran serta wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan, bertanggung jawab atas kewajiban pelaksanaan pajak Nasional. (Wicaksono, 2016).

Selain kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak, masih terdapat beberapa faktor lain yang mempengaruhi kepatuhan pelaku UMKM dalam membayar pajak. Diantaranya:

Kesadaran wajib pajak adalah perilaku atau sikap terhadap suatu objek yang melibatkan anggapan dan perasaan serta kecenderungan untuk bertindak sesuai objek tersebut. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan.

Pengetahuan wajib pajak adalah hasil kerja fikir yang merupakan tidak tahu menjadi tahu dan menghilangkan keraguan terhadap suatu perkara.

Pemahaman wajib pajak adalah proses, perbuatan, cara memahami atau menanamkan. Saat masih banyak dijumpai wajib pajak yang belum paham akan kewajiban perpajakannya, hal ini dinyatakan dalam kejadian ini banyak terjadi pada wajib pajak baru, seringkali mereka mengakui bahwa setelah mempunyai NPWP mereka tidak mengetahui konsekuensi setelahnya.

Sanksi adalah hukuman negatif kepada orang yang melanggar peraturan, sanksi pajak dibuat dengan tujuan agar wajib pajak takut untuk melanggar Undang-Undang perpajakan. Wajib pajak akan mematuhi pembayaran pajaknya bila memandang bahwa sanksi akan lebih banyak merugikannya. Denda adalah hukuman negatif kepada orang yang melanggar peraturan dengan cara membayar uang. Denda merupakan satu diantara bentuk hukuman yang diberikan berupa membayar sejumlah uang dikarenakan seseorang atau kelompok tersebut telah melanggar peraturan yang berlaku dan disepakati. (Muliari, 2010)

Kualitas pelayanan fiskus adalah cara melayani, mengurus dan menyiapkan segala keperluan yang dibutuhkan seseorang. Sementara itu fiskus adalah petugas pajak. Sehingga pelayanan fiskus dapat diartikan sebagai cara petugas pajak dalam membantu mengurangi atau menyiapkan segala keperluan yang dibutuhkan seseorang.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penelitian ini dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang berpengaruh dalam meningkatkan kesadaran kewajiban pembayaran perpajakan pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Selain itu, masih banyak Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang tingkat kesadaran dalam melakukan pembayaran pajak masih rendah,

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

hususnya pendaftaran untuk mempunyai Nomor pokok Wajib pajak (NPWP). Berdasarkan hal tersebut, maka penulis termotivasi untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul **“Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Dalam Membayar Pajak Sesuai PP No. 23 Tahun 2018 pada UMKM di Kabupaten Indragiri Hilir (INHIL)”**.

## 1.1. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak sesuai PP No. 23 tahun 2018?
2. Apakah pengetahuan dan pemahaman wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak sesuai PP No. 23 tahun 2018?
3. Apakah sanksi denda berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak sesuai PP No.23 tahun 2018?
4. Apakah kualitas pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak sesuai PP No. 23 tahun 2018?
5. Apakah kesadaran wajib pajak, pengetahuan dan pemahaman, sanksi denda, dan kualitas pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak sesuai PP No. 23 tahun 2018?

## 1.2. TUJUAN PENELITIAN

Sesuai dengan perumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

1. Untuk mengetahui apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak sesuai PP No. 23 tahun 2018?
2. Untuk mengetahui apakah pengetahuan dan pemahaman wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak sesuai PP No. 23 tahun 2018?
3. Untuk mengetahui apakah sanksi denda berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak sesuai PP No.23 tahun 2018?
4. Untuk mengetahui apakah kualitas pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak sesuai PP No. 23 tahun 2018?
5. Untuk mengetahui apakah kesadaran wajib pajak, pengetahuan dan pemahaman, sanksi denda, dan kualitas pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak sesuai PP No. 23 tahun 2018?

**1.3. MANFAAT PENELITIAN**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan, antara lain:

1. Bagi peneliti, diharapkan penelitian ini dapat membawa wawasan sekaligus sebagai tempat untuk mempraktekkan sebagian ilmu yang telah diperoleh selama masa kuliah.
2. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat membantu masyarakat khususnya pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) untuk memahami tentang PP No. 23 tahun 2018.
3. Bagi dunia pendidikan, penelitian ini diharapkan agar dapat dijadikan sebagai referensi bagi penelitian berikutnya dan diharapkan dapat

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memberi bukti empiris yang dapat menambah literatur perpajakan mengenai PP No. 23 tahun 2018.

#### **1.4. SISTEMATIKA PENULISAN**

Untuk dapat memberikan gambaran secara umum dan untuk memudahkan pembahasan penelitian ini, maka penulisan ini dibagi ke dalam lima bab dan setiap bab dibagi ke dalam beberapa sub bab, maka sistematika penulisan yang direncanakan adalah sebagai berikut:

##### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab ini akan dikemukakan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

##### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini akan dibahas tentang konsep-konsep teoritis yang relevan dengan judul peneliti.

##### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Pada bab ini membahas tentang lokasi penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, populasi dan sampel serta teknik analisis data.

##### **BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini membahas mengenai hasil dan pembahasan dari penelitian yang dilakukan.

##### **BAB V : PENUTUP**

Pada bab ini berisi mengenai kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan dan saran-saran untuk berbagai pihak dan beberapa keterbatasan penelitian.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1. Pajak

Pajak itu sendiri, menurut Soemitro dalam bukunya Mardiasmo (2011) Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Pelaksanaan pemungutan pajak memerlukan suatu sistem yang telah disetujui masyarakat melalui perwakilannya di dewan perwakilan, dengan menghasilkan suatu peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pelaksanaan perpajakan bagi fiskus maupun wajib pajak. Sistem pemungutan pajak *self assesment* yang berlaku di Indonesia menuntut wajib pajak untuk turut aktif dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya.

Kondisi perpajakan yang menuntut keikutsertaan aktif wajib pajak dalam menyelenggarakan perpajakannya membutuhkan kepatuhan wajib pajak tinggi, yaitu kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan yang sesuai dengan kebenarannya. Karena sebagian besar pekerjaan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan itu dilakukan oleh wajib pajak, bukan fiskus selaku pemungut pajak.

Sehingga kepatuhan diperlukan dalam *sistem self assessment* merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak (WP) untuk menghitung/memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

jumlah pajak yang seharusnya terutang berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan, dengan tujuan pada penerimaan pajak yang optimal.

## 2.2. Fungsi perpajakan

Menurut Resmi (2011:) pajak memiliki 2 fungsi yaitu fungsi *budgetair* (sumber keuangan negara) dan fungsi *regularend* (pengatur).

### 1. Fungsi *Budgetair* (Sumber Keuangan Negara)

Pajak mempunyai fungsi *budgetair*, artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan lain-lain.

### 2. Fungsi *Regularend* (Pengatur)

Pajak mempunyai fungsi pengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, serta mencapai tujuan-tujuan tertentu diluar bidang keuangan.

## 2.3. Sistem pemungutan perpajakan

Resmi (2011:) mengemukakan dalam pemungutan pajak dikenal beberapa sistem pemungutan, antara lain:

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

### 1. *Official Assesment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparatur perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan para aparatur perpajakan. Dengan demikian, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada aparatur perpajakan (peranan dominan ada pada aparatur).

### 2. *Self Assesment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan Wajib Pajak. Wajib Pajak dianggap mampu menghitung pajak, mampu memahami Undang-Undang yang sedang berlaku dan mempunyai kejujuran yang tinggi, serta menyadari akan arti pentingnya membayar pajak. Oleh karena itu, Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk:

- a. Menghitung sendiri pajak terutang;
- b. Memperhitungkan sendiri pajak yang terutang;
- c. Membayar sendiri jumlah pajak terutang;
- d. Melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang; dan



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Mempertanggung jawabkan pajak yang terutang.

Dengan demikian, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak bergantung pada Wajib Pajak sendiri (peranan dominan ada pada Wajib Pajak).

### 3. *With Holding System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Penunjukkan pihak ketiga ini dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan, keputusan presiden dan peraturan lainnya untuk memotong dan memungut pajak, menyetor dan mempertanggungjawabkan melalui sarana perpajakan yang tersedia. Berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada pihak ketiga yang ditunjuk.

## 2.4. Manfaat perpajakan

### 1. Manfaat Bagi Pemerintah

Menurut mardiasmo (2016) lihat dasar pedoman kegiatan kerja profesi Konsultan Pajak dan dasar pedoman kerja Direktorat Jenderal Pajak adalah sama-sama peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, maka pernah dikatakan bahwa Konsultan Pajak adalah merupakan mitra Direktorat Jenderal Pajak. Istilah mitra ini juga tercantum dalam Mukadimah Anggaran Dasar Ikatan Konsultan Pajak Indonesia. Istilah mitra di sini bukanlah berarti bahwa Konsultan Pajak adalah pegawai

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

pajak yang tidak dibayar pemerintah dan merupakan perpanjangan tangan dari Direktorat Jenderal Pajak yang harus mengekor saja, tetapi mitra dalam arti memiliki kemandirian atau independensi. Mitra di sini hendaknya diartikan bahwa antara Konsultan Pajak dan Direktorat Jenderal Pajak mempunyai pedoman kerja yang sama. Selain itu, dalam pelaksanaan sistem *self assessment* dewasa ini kedua pihak di atas juga harus menyebarluaskan dan memasyarakatkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga masyarakat Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya serta menuntut hak perpajakannya dapat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Selain itu, manfaat lain adanya profesi Konsultan Pajak bagi pemerintah antara lain:

- a. Konsultan harus ikut menyadarkan Wajib Pajak agar patuh melaksanakan kewajiban perpajakannya yang merupakan kewajiban pengabdian kepada negara dalam ikut menjamin kelangsungan pembangunan nasional. Hal ini sangat berkaitan erat dengan anggapan masyarakat Wajib Pajak bahwa kewajiban pembayaran pajak adalah merupakan suatu beban pengeluaran yang bagaimanapun juga harus selalu diupayakan penghematan.
- b. Konsultan Pajak juga ikut mengusahakan terciptanya iklim perpajakan nasional yang lebih sehat dengan melakukan kontrol sosial yaitu meneliti apakah aparat pajak dalam menuntut hak penerimaan negara

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dari sektor pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

- c. Konsultan Pajak diharapkan dapat ikut meningkatkan kualitas mutu pelayanan perpajakan kepada masyarakat Wajib Pajak.

#### 2. Manfaat Bagi Wajib Pajak

Sekarang ini pelaksanaan sistem perpajakan di Indonesia adalah dengan menerapkan sistem *self assessment*, di mana kepada Wajib Pajak diberikan kepercayaan yang lebih besar untuk menghitung dan melaporkan sendiri pajaknya. Dalam melaksanakan sistem *self assessment* tersebut dituntut adanya pemahaman dan penguasaan dari segenap lapisan masyarakat Wajib Pajak mengenai materi ketentuan perundang-undangan perpajakan, baik mengenai hak-hak Wajib Pajak maupun kewajibannya sebagai Wajib Pajak. Selain itu kepastian hukum bagi Wajib Pajak harus dijamin yang artinya *law enforcement*. Undang-Undang Perpajakan harus benar-benar dilaksanakan dengan konsekuen, yaitu baik aparatur pajak maupun Wajib Pajak harus sama-sama mematuhi ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Apabila dilihat dari jasa yang diberikan oleh Konsultan Pajak seperti yang disebutkan di atas, maka manfaat atau peranan Konsultan Pajak bagi Wajib Pajak adalah berkaitan dengan pemenuhan kewajiban perpajakan dari Wajib Pajak, yang antara lain:



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Memberikan jasa *tax compliance* audit.
- b. Membantu Wajib Pajak dalam membuat perhitungan pajaknya yang harus dibayar dan sekaligus memberikan peng arahan dalam pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) sebagai laporan tahunannya yang harus sesuai dengan ketentuan perundangundangan perpajakan.
- c. Memberikan konsultasi dalam masalah perpajakan yang dihadapi Wajib Pajak.

Selain memberikan jasa kepada Wajib Pajak mengenai pemenuhan kewajiban perpajakannya, Konsultan Pajak juga memberikan jasa kepada Wajib Pajak yang berkaitan dengan hak-hak perpajakannya. Dalam upaya untuk membantu Wajib Pajak mendapatkan hak-hak perpajakannya, peranan nyata dari Konsultan Pajak adalah antara lain dengan: Mufti Rahmatika (2010).

- a. Membantu mengusahakan terciptanya iklim yang lebih sehat dalam bidang perpajakan agar Wajib Pajak merasakan adanya kepastian hukum dalam masalah perpajakannya.
- b. Menjembatani hubungan antara Wajib Pajak dan aparat pajak yang pada umumnya dewasa ini Wajib Pajak merasakan masih ada rasa ketakutan dalam menghadapi aparat pajak.
- c. Memperjuangkan dipenuhinya hak Wajib Pajak yang diatur dalam Undang-undang perpajakan.

Semua hak-hak Wajib Pajak sudah diatur dalam ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, seperti:

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Hak meminta penangguhan pemasukan SPT (Surat Pemberitahuan) pajaknya apabila diperkirakan sampai dengan akhir Maret belum dapat diselesaikan pengisian SPT-nya.
- b. Hak mengajukan permohonan aturan penyicilan atau pengangsuran pembayaran pajak atas Surat Ketetapan Pajak (SKP) yang ditetapkan oleh Kantor Pajak.
- c. Hak mengajukan keberatan pajak atas Surat Ketetapan Pajak (SKP) ke Kantor Pajak.
- d. Hak mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan atas Surat Ketetapan Pajak (SKP) ke Kantor Pajak.
- e. Hak mengajukan permohonan banding dan gugatan ke Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (BPSP) apabila permohonan keberatan pajaknya ditolak oleh Direktorat Jenderal Pajak.
- f. Hak meminta ke Direktorat Jenderal Pajak dasar-dasar perhitungan pajak atas Ketetapan Pajak yang ditetapkan dalam hal akan mengajukan keberatan pajak.
- g. Hak meminta keringanan ataupun pembebasan pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dalam hal:
  - 1) perusahaan mengalami kerugian dalam tahun pajak sebelumnya.
  - 2) dalam tahun pajak berjalan, perusahaan sudah bisa membuktikan kalau mengalami kerugian.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- h. Hak untuk meminta Konsultan Pajak mendampingi Wajib Pajak dalam hal dilakukan pemeriksaan pajak, baik oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau oleh Kantor Pemeriksaan Pajak (Karikpa).
- i. Hak untuk menanyakan Surat Perintah Pemeriksaan Pajak bila menghadapi Petugas Pemeriksa Pajak.
- j. Hak-hak Wajib Pajak lainnya yang mungkin dapat diketahui selama proses pemeriksaan pajak dilakukan.

## 2.5. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

### 2.5.1 Usaha mikro

Menurut Mufti Rahmatika (2010) Pengertian usaha mikro dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM Pasal 1 angka 1 yang dimaksud dengan usaha mikro adalah usaha produktif milik orang atau perseorangan dan/atau badan usaha perseorangan yang mempunyai kriteria sebagai berikut: memiliki kekayaan paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). Ciri-ciri usaha mikro:

- a. Jenis barang/komoditi usahanya tidak selalu tetap, sewaktu-waktu dapat berganti;
- b. Tempat usahanya tidak selalu menetap, sewaktu-waktu dapat pindah tempat;
- c. Belum melakukan administrasi keuangan yang sederhana sekalipun, dan tidak memisahkan keuangan keluarga dengan keuangan usaha;



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Sumber daya manusianya (pengusahanya) belum memiliki jiwa wirausaha yang memadai;
- e. Tingkat pendidikan rata-rata relatif sangat rendah;
- f. Umumnya belum akses kepada perbankan, namun sebagian dari mereka sudah akses ke lembaga keuangan non bank;
- g. Umumnya tidak memiliki izin usaha atau persyaratan legalitas lainnya termasuk NPWP.

Contoh usaha mikro:

- a. Usaha tani pemilik dan penggarap perorangan, peternak, nelayan dan pembudidaya;
- a. Industri makanan dan minuman, industri meubelair, pengolahan kayu dan rotan, industri pandai besi pembuat alat-alat;
- b. Usaha perdagangan seperti kaki lima serta pedagang di pasar dll;
- c. Peternakan ayam, itik dan perikanan;
- d. Usaha jasa-jasa seperti perbengkelan, salon kecantikan, ojek dan penjahit (konveksi).

**2.5.2. Usaha kecil**

Menurut Mufti Rahmatika (2010). Sedangkan kriteria usaha kecil adalah sebagai berikut: usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha kecil yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Atau memiliki penjualan tahunan lebih dari Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah). Ciri-ciri usaha kecil:

- a. Jenis barang/komoditi yang diusahakan umumnya sudah tetap tidak gampang berubah;
- b. Lokasi/tempat usaha umumnya sudah menetap tidak berpindah-pindah;
- c. Pada umumnya sudah melakukan administrasi keuangan walau masih sederhana, keuangan perusahaan sudah mulai dipisahkan dengan keuangan keluarga, sudah membuat neraca usaha;
- d. Sudah memiliki izin usaha dan persyaratan legalitas lainnya termasuk NPWP;
- e. Sumber daya manusia (pengusaha) memiliki pengalaman dalam berwira usaha;
- f. Sebagian sudah akses ke perbankan dalam hal keperluan modal;
- g. Sebagian besar belum dapat membuat manajemen usaha dengan baik seperti *business planning*.

Contoh usaha kecil:

- h. Usaha tani sebagai pemilik tanah perorangan yang memiliki tenaga kerja;
- i. Pedagang dipasar grosir (agen) dan pedagang pengumpul lainnya;

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- j. Pengrajin industri makanan dan minuman, industri meubelair, kayu dan rotan, industri alat-alat rumah tangga, industri pakaian jadi dan industri kerajinan tangan;
- k. Peternakan ayam, itik dan perikanan;
- l. Koperasi berskala kecil.

**2.5.3. Usaha menengah**

Menurut Mufti Rahmatika (2010). Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dan kriteria usaha menengah adalah sebagai berikut: memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah). Ciri-ciri usaha menengah:

- 2.6. Pada umumnya telah memiliki manajemen dan organisasi yang lebih baik, lebih teratur bahkan lebih modern, dengan pembagian tugas yang jelas antara lain, bagian keuangan, bagian pemasaran dan bagian produksi;



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Telah melakukan manajemen keuangan dengan menerapkan sistem akuntansi dengan teratur, sehingga memudahkan untuk auditing dan penilaian atau pemeriksaan termasuk oleh perbankan;
- d. Telah melakukan aturan atau pengelolaan dan organisasi perburuhan, telah ada Jamsostek, pemeliharaan kesehatan dll;
- e. Sudah memiliki segala persyaratan legalitas antara lain izin tetangga, izin usaha, izin tempat, NPWP, upaya pengelolaan lingkungan dll;
- f. Sudah akses kepada sumber-sumber pendanaan perbankan;
- g. Pada umumnya telah memiliki sumber daya manusia yang terlatih dan terdidik.

Contoh usaha menengah:

Jenis atau macam usaha menengah hampir menggarap komoditi dari hampir seluruh sektor mungkin hampir secara merata, yaitu:

- a. Usaha pertanian, peternakan, perkebunan, kehutanan skala menengah;
- b. Usaha perdagangan (grosir) termasuk ekspor dan impor;
- c. Usaha jasa EMKL (Ekspedisi Muatan Kapal Laut), garment dan jasa transportasi taxi dan bus antar provinsi;
- d. Usaha industri makanan dan minuman, elektronik dan logam;
- e. Usaha pertambangan batu gunung untuk konstruksi dan marmer buatan

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 terdapat beberapa definisi yang mengklasifikasikan entitas dengan melihat dua aspek yaitu kekayaan bersih (aset) dan hasil penjualan (omset).

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Tabel 2.1**  
**Kriteria Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)**

Kriteria	Mikro	Kecil	Menengah
Aset	Paling banyak Rp. 50.000.000	Rp. 50.000.000 – 500.000.000	Rp. 500.000.000 – 10.000.000.000
Omset	Paling banyak Rp. 300.000.000	Rp. 300.000.000 – 2.500.000.000	Rp. 2.500.000.000 – 50.000.000.000.000

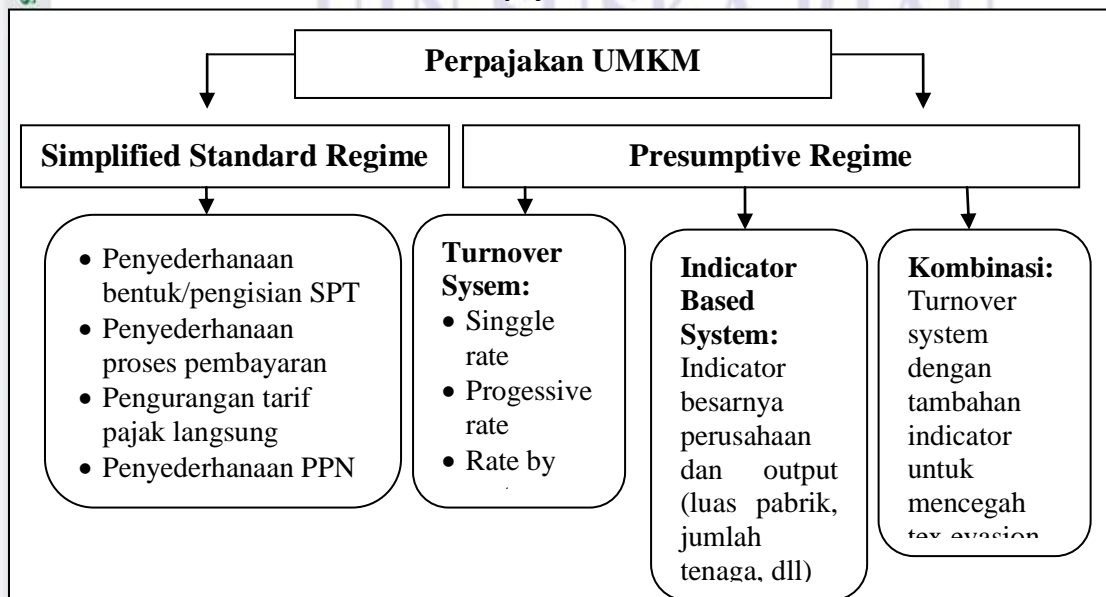
Sumber: UU No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM

## 2.7. Model Perpajakan UMKM

Secara umum, model perpajakan UMKM dapat dibagi dalam dua kelompok besar, sebagaimana ditunjukkan pada gambar.1. Kelompok pertama adalah sistem *standard regime* dan kedua sistem *presumptive regime*. Dalam *standard regime*, UMKM tidak dibedakan perlakuan perpajakannya. Namun demikian terdapat beberapa negara yang menerapkan *standard regime* dengan penyederhanaan formulir perpajakan, tata cara pembayaran, atau dengan pengurangan tarif. Negara-negara yang menerapkan *standard regime* untuk UMKM pada umumnya adalah negara-negara maju, yang komunitas UMKM nya telah memiliki efisiensi administrasi tinggi dan mempunyai kemampuan *book-keeping* yang memadai.

**Gambar 2. 1**

**Model Perpajakan UMKM**



Sementara itu, dalam model *presumptive regime*, PPh dikenakan berdasarkan pada presumsi kondisi tertentu dari Wajib Pajak. *Presumptive regime* biasa digunakan terutama di negara di mana mayoritas pembayar pajaknya adalah kelompok yang susah untuk dipajaki ("*hard to tax*"), dan sumber daya adminstrasinya yang tidak memadai. Di negara tersebut sebagian besar wajib pajaknya tidak memiliki transparansi keuangan yang memungkinkan untuk pengenaan pajak secara efektif oleh pemerintah. Oleh karenanya, pemerintah perlu membuat perkiraan atau presumsi atas batasan pendapatan yang tepat untuk dikenai pajak. *Presumptive regime* lebih banyak diterapkan di negara-negara non-OECD. Regime ini pada umumnya digunakan dengan tujuan untuk meningkatkan *compliance* dan mendorong *record keeping* Wajib Pajak. Penerapan *presumptive regime* pada umumnya menggunakan *turnover based system*, *indicator based system*, atau gabungan keduanya. Namun demikian di negara transisi, *turnover system* merupakan model yang umum digunakan. Sebelum berlakunya PP 46 Tahun 2013, Indonesia menerapkan model *standard regime* dengan kemudahan dan fasilitas tertentu (*standard regime-simplified/reduced rate*). Kemudahan diberikan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP), sebagaimana di atur dalam Pasal 14 ayat (2) UU PPh, yaitu WP OP yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang peredaran brutonya dalam satu tahun kurang dari Rp4,8 miliar, diperkenankan untuk menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN) dalam penghitungan penghasilan kena pajak nya. Sedangkan *reduced rate* diberlakukan untuk Wajib Pajak Badan, sebagaimana diatur dalam



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

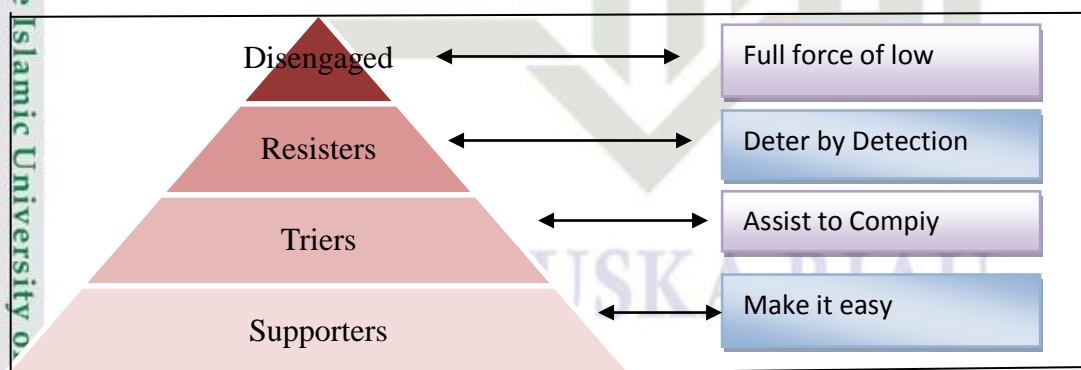
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pasal 31E UU PPh, bahwa WP Badan dalam negeri dengan peredaran bruto satu tahun sampai dengan Rp50 miliar, mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif normal PPh yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp4,8 miliar.

### 2.8. Kebijakan PPh UMKM

Penerapan *standard regime-simplified/reduced rate* di Indonesia terlihat belum mampu mendorong *voluntary compliance* UMKM. Hal ini dapat dilihat dari indikasi adanya *miss-match* antara kontribusi UMKM pada PDB dengan kontribusi UMKM pada penerimaan pajak. Dengan memperhatikan karakteristik dari UMKM sebagaimana pada bagian III, maka perlu disusun strategi untuk meningkatkan compliance dari UMKM. Strategi peningkatan compliance Wajib Pajak, adalah sebagaimana ditunjukkan oleh piramida attitude to compliance pada gambar II.

Gambar 2.2  
Piramida Attitude to Compliance



Sumber: world bank

Di puncak piramida, dengan jumlah populasi yang paling kecil, adalah mereka yang memutuskan untuk tidak taat pada ketentuan (*disengaged*). Strategi

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

yang harus diterapkan untuk kelompok ini adalah melalui penegakan hukum secara penuh, untuk memberi efek jera. Kelompok kedua dari puncak piramida adalah mereka yang tidak mau taat tetapi akan taat apabila Pemerintah memberikan perhatian kepada mereka (*Resisters*). Untuk kelompok ini strategi yang dapat dilakukan adalah pencegahan melalui deteksi awal atas kecenderungan penghindaran pajak. Untuk kelompok ke dua dari dasar piramida, adalah kelompok yang mencoba untuk taat tetapi mengalami kesulitan untuk memenuhi ketentuan yang berlaku (*Tries*). Strategi yang dapat dilakukan untuk kelompok ini adalah pemberian asistensi dan kemudahan agar dapat mentaati ketentuan. Di dasar piramida adalah kelompok yang bersedia untuk memenuhi ketentuan yang berlaku (*Supporters*). Untuk kelompok terakhir ini, upaya peningkatan *compliance* dilakukan dengan memberikan kemudahan, karena dengan kemudahan yang diberikan akan menimbulkan ketaatan sukarela.

## 2.9. Sistim Perhitungan PPh UMKM PP No. 23 Tahun 2018

Besarnya tarif Pajak Penghasilan adalah 0,5% (satu persen) dan bersifat final. Dasar pengenaan pajak yang digunakan untuk menghitung Pajak Penghasilan adalah jumlah peredaran bruto setiap bulan.

$$\text{PPh (Final)} = 0,5\% \times \text{jumlah peredaran bruto setiap bulan}$$

Contoh perhitungan PPh UMKM:

## 2.10. PPh Orang Pribadi

Ketentuan untuk wajib pajak orang pribadi yang memiliki peredaran bruto sampai dengan Rp.4.800.000.000,00 per tahun (Peraturan Pemerintah No

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

23/2018). Tarif pajak final = 0,5% dari peredaran bruto sebulan mulai tahun berikutnya.

Hari Nugroho adalah orang pribadi yang memiliki took material “Cakar Beton”, dengan jumlah peredaran bruto selama tahun 2018 sebesar Rp.3.500.000.000,00. Karena jumlah peredaran bruto dari usaha took material “Cakar Beton” sebesar Rp.3.500.000.000,00 (kurang dari Rp.4.800.000.000,00), maka untuk tahun 2014, Hari Nugroho termasuk Wajib Pajak orang pribadi pengusaha tertentu yang dikenakan Tarif Final berdasarkan PP No.46/2013. Misalkan pada bulan Januari 2014, took Cakar Beton memperoleh peredaran bruto sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah), maka paling lambat pada tanggal 15 Februari 2014, Hari Nugroho wajib menyetorkan PPh yang bersifat final sebesar:  $0,5\% \times \text{Rp.100.000.000,00} = \text{Rp. 500.000,00}$  ke kas Negara dan melaporkan ke kantor pajak dengan menggunakan SPT Masa PPh Pasal 4 ayat 2 setiap bulan selama tahun 2014. Selama tahun 2014, Hari Nugroho tidak membayar angsuran PPh Pasal 25 dan tidak berlaku koreksi fiskal dan kredit pajak.<sup>76</sup>

## 2.11. PPh Badan

Wajib Pajak badan yang memiliki peredaran bruto sampai dengan Rp.4.800.000.000,00 per tahun (PP No 23/2018). Bagi Wajib Pajak orang pribadi atau Badan tidak termasuk bentuk usaha tetap, yang menerima penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp.4.800.000.000,00 dalam satu Tahun Pajak, dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final dengan tariff 0,5%. Pajak Penghasilan terutang dihitung berdasarkan tarif 0,5% (satu persen)



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

dikalikan dengan dasar pengenaan pajak berupa jumlah peredaran bruto setiap bulan, untuk setiap tempat kegiatan usaha. Pengenaan Pajak Penghasilan didasarkan pada peredaran bruto dari usaha dalam 1 (satu) tahun dari Tahun Pajak terakhir sebelum Tahun Pajak yang bersangkutan.

2.11.2. Jumlah penjualan kotor PT. Aisyah dalam tahun 2013 sebesar Rp.4.700.000.000,00. Karena jumlah peredaran bruto PT. Aisyah tahun 2013 hanya sebesar Rp.4.700.000.000,00 (kurang dari Rp.4.800.000.000,00), maka untuk tahun 2014, PT. Aisyah termasuk Wajib Pajak badan tertentu yang dikenakan Tarif Final berdasarkan PP No. 23/2018. Misalkan pada bulan Januari 2014, PT. Aisyah memperoleh peredaran bruto sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), maka paling lambat pada tanggal 15 Februari 2014, PT. Aisyah wajib menyetorkan PPh yang bersifat final sebesar :

$$0,5\% \times \text{Rp.300.000.000,00} = \text{Rp.1.500.000,00}$$

ke kas Negara dan melaporkan ke kantor pajak dengan menggunakan SPT Masa PPh Pasal 4 ayat 2 setiap bulan selama tahun 2014. Selama tahun 2014, PT. Aisyah tidak membayar angsuran PPh Pasal 25, tidak berlaku oreksi fiskal dan kredit pajak.<sup>79</sup>

## 2.12. Kepatuhan Membayar Pajak

Kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela merupakan tulang punggung sistem *self assesment*, dimana wajib pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakan dan kemudian secara akurat dan tepat waktu membayar dan melaporkan pajaknya tersebut. (Mustikasari, 2006)

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ada dua macam kepatuhan pajak, yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan Formal adalah suatu keadaan di mana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perpajakan. Misalnya melaporkan SPT tepat waktu. Kepatuhan Material adalah suatu keadaan di mana wajib pajak secara substantif atau hakikatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan yakni sesuai dengan isi dan jiwa Undang-Undang Perpajakan. Misalnya mengisi SPT dengan jujur, lengkap dan benar, serta melaporkannya ke Kantor Pelayanan Pajak tepat waktu.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia istilah “kepatuhan” berarti tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan. Dalam perpajakan kita dapat memberi pengertian bahwa kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan, tunduk, dan patuh serta melaksanakan ketentuan perpajakan. Kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela merupakan tulang punggung sistem *self assesment*, dimana wajib pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakan dan kemudian secara akurat dan tepat waktu membayar dan melaporkan pajaknya tersebut.

### 2.13. Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak

Berikut ini adalah beberapa factor-faktor yang diduga mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak sesuai dengan PP No. 23 tahun 2018.

#### 2.13.1. Kesadaran wajib pajak

Menurut Ritonga (2011) kesadaran adalah perilaku atau sikap terhadap suatu objek yang melibatkan anggapan dan perasaan serta

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kecenderungan untuk bertindak sesuai objek tersebut. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak merupakan perilaku wajib pajak berupa pandangan atau perasaan yang melibatkan pengetahuan, keyakinan, dan penalaran disertai kecenderungan untuk bertindak sesuai peraturan yang diberikan oleh sistem dan ketentuan pajak tersebut.

Kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan (Muliari dan Setiawan, 2010). *Theory of Planned Behavior* relevan untuk menjelaskan perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Sebelum individu melakukan sesuatu, individu tersebut akan memiliki keyakinan mengenai hasil yang akan diperoleh dari perilakunya tersebut. Kemudian yang bersangkutan akan memutuskan bahwa akan melakukannya atau tidak melakukannya. Hal tersebut berkaitan dengan kesadaran wajib pajak. Wajib pajak yang sadar pajak, akan memiliki keyakinan mengenai pentingnya membayar pajak untuk membantu menyelenggarakan pembangunan negara (*behavioral beliefs*). Berdasarkan uraian tersebut dapat dikatakan bahwa kesadaran wajib pajak diduga akan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. (Brata, 2017).



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Kesadaran wajib pajak akan meningkat bilamana wajib pajak tersebut berpersepsi baik terhadap pajak itu sendiri. Dengan diterapkan *self assessment system* akan memberikan perubahan sikap kesadaran masyarakat dalam membayar pajak secara sukarela tanpa ada paksaan dari petugas fiskus (Suhendra, 2010). Hasil penelitian yang berbeda dikemukakan oleh Widayati dan Nurlis (2010) dan juga Utami dan Kardinal (2013) dimana kesadaran tidak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak.

Kesadaranan perpajakan adalah kondisi di mana seseorang mengetahui, mengakui, serta mematuhi ketentuan perpajakan yang berlaku dan memiliki kesungguhan serta keinginan dalam memenuhi dan menjalankan kewajiban perpajakan (Dewinta, 2012). Berdasarkan pengertian tersebut, dapat dikatakan bahwa kesadaran perpajakan merupakan keadaan dimana wajib pajak sadar terhadap pentingnya pajak. Wajib pajak yang memiliki kesadaran tersebut akan memiliki keinginan dan niat untuk menjalankan kewajiban perpajakan yaitu salah satunya dengan melakukan pelaporan SPT.

### 2.13.2. Pengetahuan dan pemahaman wajib pajak

#### 1. Pengetahuan Wajib Pajak

Menurut Widayati dan Nurlis (2010), pengetahuan adalah hasil kerja fikir (penalaran) yang merubah tidak tahu menjadi tahu dan menghilangkan keraguan terhadap suatu perkara.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ada beberapa pokok-pokok penting bahwa wajib pajak mengetahui dan memahami peraturan pemerintah No 23 tahun 2018. Pertama, bagi wajib pajak badan tidak termasuk bentuk usaha tetap yang menerima penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp 4,8 miliar dalam satu tahun pajak, dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final dengan tarif 0,5%. Kedua, dasar pengenaan pajak yang digunakan untuk menghitung pajak penghasilan final adalah jumlah peredaran bruto setiap bulan. Ketiga, dikecualikan dari pengenaan PPh final berdasarkan ketentuan ini adalah penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas yang diperoleh: tenaga ahli, pemain musik, olahragawan, penasihat, pengarang, agen iklan, pengawas atau pengelola proyek, perantara. Keempat, tidak termasuk dalam pengertian wajib pajak yang dikenakan dengan PP ini adalah wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dan/atau jasa yang dalam usahanya menggunakan sarana atau prasarana yang dapat dibongkar pasang, baik yang menetap maupun tidak menetap dan menggunakan sebagian atau seluruh tempat untuk kepentingan umum yang tidak diperuntukkan bagi tempat usaha atau berjualan. Kelima, PP ini tidak berlaku atas penghasilan yang bersifat final berdasarkan ketentuan perpajakan yang berlaku.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2. Pemahaman Wajib Pajak

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pemahaman adalah proses, perbuatan, cara memahami atau menanamkan. Menurut Depdikbud pemahaman adalah suatu proses, cara memahami, cara mempelajari baik-baik supaya paham dan berpengetahuan banyak. Sedangkan wajib pajak adalah orang pribadi atau badan meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang perpajakan. (Mardiasmo, 2009: 7)

Saat ini masih banyak dijumpai wajib pajak yang belum paham akan kewajiban perpajakannya, hal ini dinyatakan Damayanti (2012) dalam Kuraesin (2013) kejadian ini banyak terjadi pada wajib pajak baru, seringkali mereka mengakui bahwa setelah mempunyai NPWP mereka tidak mengetahui konsekuensi setelahnya, sehingga ketika keluar Surat Ketetapan Pajak (SKP) secara jabatan, wajib pajak tersebut merasa keberatan karena merasa tidak ada sosialisasi sebelumnya.

### 2.13.3. Sanksi denda

#### 1. Sanksi

Menurut Lubis (2010:3) Sanksi adalah hukuman negatif kepada orang yang melanggar peraturan, dan denda adalah hukuman dengan cara membayar uang karena melanggar



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

peraturan dan hukum yang berlaku, sehingga dapat dikatakan bahwa sanksi. Undang-Undang dan peraturan secara garis besar berisikan hak dan kewajiban, tindakan yang diperkenankan dan tidak diperkenankan oleh masyarakat. Agar Undang-Undang dan peraturan itu dipatuhi, maka harus ada sanksi bagi pelanggarnya, demikian halnya untuk hukum pajak. Adapula sanksi-sanksi perpajakan bagi wajib pajak orang pribadi, yaitu sebagai berikut:

- 1) Rp.100.000 apabila Surat Pemberitahuan (SPT) Masa tidak disampaikan atau disampaikan tidak sesuai dengan batas waktu, misalnya paling lambat 20 hari setelah akhir masa pajak.
- 2) Sanksi bunga untuk Pajak Penghasilan (PPh) wajib pajak orang pribadi, yaitu sebesar 2% sebulan untuk selama-lamanya 24 bulan atas jumlah pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar.
- 3) Sanksi pidana bagi wajib pajak orang pribadi yang karena kealpaannya.

Sanksi pajak dibuat dengan tujuan agar wajib pajak takut untuk melanggar Undang-Undang Perpajakan. Wajib pajak akan mematuhi pembayaran pajaknya bila memandang bahwa sanksi akan lebih banyak merugikannya. Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi, dengan kata lain

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. (Mardiasmo, 2011:59). Sanksi pajak terkait dengan *control beliefs* yang merupakan salah satu faktor dari *Theory of Planned Behavior*. Kepatuhan wajib pajak akan ditentukan berdasarkan persepsi wajib pajak tentang seberapa kuat sanksi pajak mampu mendukung perilaku wajib pajak untuk taat pajak. Oleh karena itu, pandangan wajib pajak mengenai sanksi perpajakan diduga akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

Mengemukakan bahwa Undang-undang pajak dan peraturan pelaksanaannya tidak memuat jenis penghargaan bagi WP yang taat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan baik berupa prioritas untuk mendapatkan pelayanan publik ataupun piagam penghargaan. Walaupun WP tidak mendapatkan penghargaan atas kepatuhannya dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, WP akan dikenakan banyak hukuman apabila alfa atau sengaja tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya.

## 2. Denda

Denda adalah hukuman negatif kepada orang yang melanggar peraturan dengan cara membayar uang. Denda merupakan satu diantara bentuk hukuman yang diberikan berupa membayar sejumlah uang dikarenakan seseorang atau kelompok tersebut telah melanggar peraturan yang berlaku dan disepakati.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada pasal 8 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjelaskan bahwa terdapat beberapa perbuatan wajib pajak yang dapat dikenakan sanksi, oleh karena itu sanksi menjadi suatu jaminan yang pasti agar peraturan tersebut dapat ditaati dan dipatuhi oleh wajib pajak. Dapat dikatakan bahwa sanksi adalah alat untuk membuat wajib pajak lebih mentaati dan mematuhi peraturan perpajakan yang telah ada. (Fajriyan, 2015: 3)

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa peningkatan kemungkinan pemeriksaan dan denda pajak yang tinggi akan dapat meningkatkan kepatuhan pajak. Kepatuhan pajak akan menurun jika pembayar pajak mempersepsikan pemeriksaan pajak akan sedikit karena meyakini bahwa mereka akan terus dapat melakukan kecurangan. Penelitian ini mempertimbangkan variabel pemeriksaan dan denda pajak sebagai faktor yang dapat meningkatkan kepatuhan pajak.

#### **2.13.4. Kualitas pelayanan fiskus**

Kualitas pelayanan merupakan suatu kondisi dinamis yang berpengaruh dengan produk, jasa, manusia, proses dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan. Pelayanan adalah suatu kegiatan atau urutan kegiatan yang terjadi dalam interaksi langsung antara seseorang dengan orang lain atau mesin secara fisik, dan menyediakan kepuasan pelanggan.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pelayanan adalah cara melayani (membantu mengurus dan menyiapkan segala keperluan yang dibutuhkan seseorang). Sementara itu fiskus adalah petugas pajak. sehingga pelayanan fiskus dapat diartikan sebagai cara petugas pajak dalam membantu mengurus atau menyiapkan segala keperluan yang dibutuhkan seseorang (dalam hal ini Wajib Pajak)

## 2.14. Pajak Dalam Pandangan Islam

Menurut Gusfahmi (2011). Dalam istilah bahasa Arab, pajak dikenal dengan nama al-‘usyr atau al-maks, atau bisa juga disebut ad-daribah, yang artinya adalah pungutan yang ditarik dari rakyat oleh para penarik pajak. Atau suatu ketika bisa disebut al-kharaj, akan tetapi al-kharaj biasa digunakan untuk pungutan-pungutan yang berkaitan dengan tanah secara khusus. Sedangkan para pemungutnya disebut sahibul maks atau al-‘asyar.

Pajak adalah suatu pembayaran yang dilakukan kepada pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan dalam hal menyelenggarakan jasa-jasa untuk kepentingan umum. Pajak menurut definisi para ahli keuangan ialah kewajiban yang ditetapkan terhadap wajib pajak, yang harus disetorkan kepada negara dengan ketentuan tanpa mendapat prestasi kembali dari negara dan hasilnya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum di satu pihak dan untuk merealisasikan sebagian tujuan ekonomi, sosial, politik dan tujuan-tujuan lain yang ingin dicapai oleh negara.

Pada masa Rasulullah SAW dan kekhalifahan Islam, pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara dari selain zakat, kekayaan yang diperoleh dari musuh tanpa perang (fay’), harta wakaf, barang temuan (luqatah) dan dari

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kekayaan alam. Pajak dalam Islam terbagi atas 3 macam yaitu jizyah (pajak kepala), kharaj (pajak bumi), dan 'usur (pajak atau bea cukai atas barang ekspor dan impor).

Pajak merupakan kewajiban yang ditetapkan terhadap wajib pajak, yang harus disetorkan kepada negara sesuai dengan ketentuan, tanpa mendapat prestasi kembali dari negara dan hasilnya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum di satu pihak dan untuk merealisasikan sebagian tujuan ekonomi, sosial, politik dan tujuan-tujuan lain yang ingin dicapai negara. Pajak merupakan kewajiban berupa harta yang pengurusannya dilakukan oleh negara. Negara memintanya secara paksa, bila seseorang tidak mau membayarnya sukarela, kemudian hasilnya digunakan untuk membiayai proyek-proyek untuk kepentingan masyarakat.

Di dalam Islam, selain zakat masih ada cara untuk mendapatkan/memungut dana untuk kepentingan perjuangan termasuk pajak. Warga negara membayar pajak sebagai konsekuensi atas hak perlindungan yang diperoleh dari pemerintah yaitu suatu kewajiban untuk patuh dan taat dalam membantu negara dalam menjalankan pemerintahan, kewajiban warga negara kepada pemerintah tersebut tertuang dalam firman Allah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan Ulil Amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-

*Qur'an) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya". (QS. An-Nisa': 59).*

## 2.15. Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan judul penelitian ini adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.2**  
**Penelitian terdahulu**

No	Nama / Tahun	Judul	Variabel	Hasil
1	Prabowo Yudo Jayanto (2011)	Faktor-Faktor Ketidakpatuhan Wajib Pajak	1.Karakteristik individu (X1) 2.Kondisi keuangan (X2) 3.Iklim organisasi (X3) 4.Ketidakpatuhan wajib pajak(Y)	Hasilnya menunjukkan bahwa hanya variabel norma subjektif yang berpengaruh terhadap ketidakpatuhan wajib pajak.
2	Ready Wicaksono (2016)	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Dalam Membayar Pajak Sesuai PP No. 46 Tahun 2013 Pada UMKM Di Kabupaten Bantul	1.Kesadaran wajib pajak (X1) 2.Pengetahuan dan pemahaman (X2) 3.Sanksi denda (X3) 4.Kualitas pelayanan fiskus (X4) 5.Kepatuhan wajib pajak (Y)	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pelaku UMKM di Kabupaten Bantul memiliki kesadaran, pengetahuan dan pemahaman yang cukup tentang PP No 46, sanksi denda dalam perpajakan serta kualitas pelayanan fiskus yang dirasa cukup baik.
	Mufti Rahmatika (2010)	Analisis Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Kesadaran Kewajiban Perpajakan pada	1. Pengetahuan WP (X1) 2. Pemahaman sistem <i>self assessment</i> (X2) 3. Tingkat penghasilan WP	Hasil data penelitian ini menunjukan bahwa pemahaman sistem <i>self assessment</i> dan tingkat penghasilan wajib pajak yang



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		Sektor Usaha Kecil dan Menengah	(X3) 4. Kemudahan (X4) 5. Kesadaran kewajiban perpajakan UKM (Y)	tidak berpengaruh secara signifikan, sedangkan variabel yang lain seperti pengetahuan wajib pajak dan tingkat kemudahan dalam melakukan sistem pembayaran perpajakan berpengaruh terhadap kesadaran kewajiban perpajakan pada sektor usaha kecil dan menengah dengan nilai signifikan.
4	Zulia Hanum (2009)	Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Usaha Kecil Menengah Dalam Pelaporan Kewajiban Perpajakan di Kota Medan	1. Pengetahuan wajib pajak (X1) 2. Pemahaman (X2) 3. Manfaat (X3) 4. pengetahuan, pemahaman (X4) 5. Pelaporan kewajiban perpajakan (Y)	Hasil pembahasan diketahui bahwa yang paling besar pengaruhnya terhadap pelaporan kewajiban perpajakan pada di kota Medan.
	Febirizki Damayanty, dkk. (2016)	Pengaruh Pemahaman Atas Mekanisme Pembayaran Pajak, Persepsi Tarif Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Pada Wajib Pajak Yang Terdaftar Di KPP Pratama Batu)	1. Pemahaman (X1) 2. Persepsi tarif pajak (X2) 3. Sanksi pajak (X3) 4. Kepatuhan wajib pajak UMKM (Y)	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman atas mekanisme pembayaran pajak, persepsi tarif pajak dan sanksi pajak berpengaruh signifikan baik secara simultan maupun parsial.

Sumber: Data diolah 2018

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

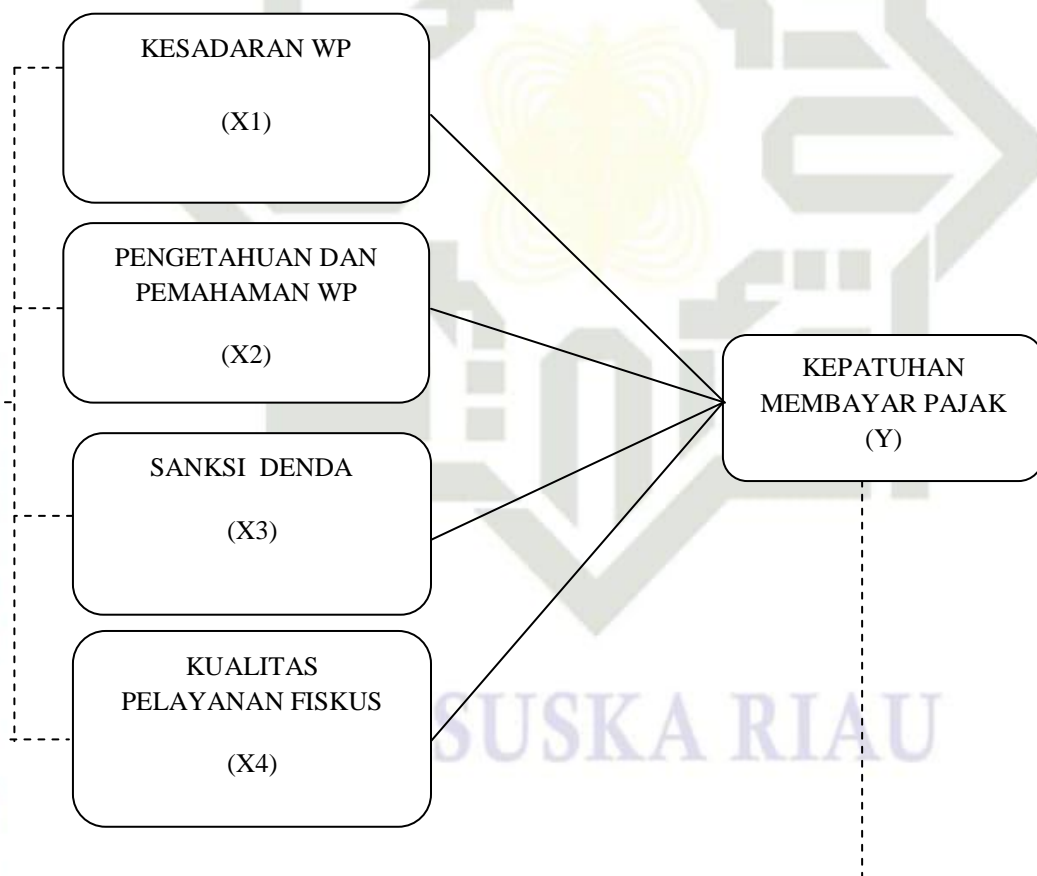
- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2.16. Kerangka Konseptual

Penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan beberapa data-data dan informasi terkait dengan judul penelitian yang sedang diteliti selanjutnya melakukan analisis terhadap beberapa data-data dan informasi serta menilai hasil dari proses analisis dan menarik suatu kesimpulan dari hasil akhir penelitian yang dilakukan. Secara konseptual, rangka berpikir yang diajukan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

**Gambar 2.3**  
**Kerangka Konseptual**



**Sumber: Data diolah 2018**

Parsial = \_\_\_\_\_ Simultan = -----

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## **2.17. Pengembangan Hipotesis**

### **2.17.1. Kesadaran membayar pajak terhadap kepatuhan membayar Pajak UMKM**

Menurut Widayati dan Nurlis (2010), kesadaran merupakan unsur dalam manusia dalam memahami realitas dan bagaimana cara bertindak atau menyikapi terhadap realitas. Kesadaran yang dimiliki oleh manusia kesadaran dalam diri, akan diri sesama, masa silam, dan kemungkinan masa depannya.

Munculnya peraturan terbaru pemerintah tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu yaitu PP No. 23 Tahun 2018 di landasi oleh adanya potensi pajak dari sektor UMKM yang belum tergali secara optimal. Kesadaran pelaku UMKM atas perpajakan amatlah diperlukan guna meningkatkan kepatuhan, sehingga ketika WP sudah semakin sadar akan kewajibannya untuk membayar pajak maka dia akan semakin patuh untuk membayar pajak. Berdasarkan hal tersebut maka hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut:

**Ha1: Kesadaran wajib pajak UMKM untuk membayar pajak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak sesuai PP No. 23 tahun 2018.**

### **2.17.2. Pengetahuan dan pemahaman terhadap kepatuhan membayar Pajak UMKM**

Menurut Widayati dan Nurlis (2010), pengetahuan adalah hasil kerja fikir (penalaran) yang merubah tidak tahu menjadi tahu dan



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menghilangkan keraguan terhadap suatu perkara. Pengetahuan adalah informasi yang diketahui atau disadari oleh seseorang. Dalam pengertian lain, pengetahuan adalah berbagai gejala yang ditemui dan diperoleh manusia melalui pengamatan akal. Pengetahuan muncul ketika seseorang menggunakan akal budinya untuk mengenali benda atau kejadian tertentu yang belum pernah dilihat atau dirasakan sebelumnya. (Utami, dkk., 2012)

Faktor lain yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak sesuai dengan PP No. 23 ini ialah Keikutsertaan Wajib Pajak dalam mengikuti sosialisasi yang dilakukan oleh KPP. Wajib pajak yang tidak memahami peraturan perpajakan secara jelas cenderung akan menjadi wajib pajak yang tidak taat. Jelas bahwa semakin paham wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, maka semakin paham pula wajib pajak terhadap sanksi yang akan diterima bila melalaikan kewajiban perpajakan mereka. Setiap wajib pajak yang telah memahami peraturan perpajakan sangat baik, biasanya akan melakukan aturan perpajakan yang ada sesuai dengan apa yang tercantum di dalam peraturan yang ada. Maka hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut:

**Ha2: Pengetahuan dan pemahaman wajib pajak UMKM terhadap PP No. 23 tahun 2018 berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak.**

### 2.17.3. Sanksi denda terhadap kepatuhan membayar Pajak UMKM

Menurut Arabella dkk (2013). Sanksi adalah hukuman negatif kepada orang yang melanggar peraturan, dan denda adalah hukuman

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan cara membayar uang karena melanggar peraturan dan hukum yang berlaku, sehingga dapat dikatakan bahwa sanksi denda adalah hukuman negatif kepada orang yang melanggar peraturan dengan cara membayar uang.

WP akan mematuhi pembayaran pajak bila memandang sanksi denda akan lebih banyak merugikannya. Semakin banyak sisa tunggakan pajak yang harus dibayar WP, maka akan semakin berat bagi WP untuk melunasinya. Oleh sebab itu sikap atau pandangan WP terhadap sanksi denda diduga akan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan WP dalam membayar pajak. hal ini sangat relevan jika digunakan sebagai variabel bebas dalam penelitian ini. Maka hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut:

**Ha3: Sanksi Denda berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak sesuai PP No. 23 tahun 2018.**

#### **2.17.4. Kualitas pelayanan fiskus terhadap kepatuhan membayar Pajak UMKM**

Menurut Lidya (2015). Kualitas pelayanan fiskus terhadap wajib pajak menjadi suatu hal yang penting dalam kesadaran wajib pajak untuk mau membayar pajak. Oleh sebab itu meningkatkan kualitas pelayanan fiskus terhadap wajib pajak menjadi hal utama. Terlebih bagi para pelaku UMKM yang merasa kurang mengerti alasan pemerintah mengenakan tarif final 0,5% setelah munculnya peraturan terbaru yaitu PP No. 23 tahun 2018 yang berlaku efektif 1 Juli 2018.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak tergantung pada bagaimana petugas pajak memberikan mutu pelayanan yang terbaik kepada wajib pajak. Selama ini peranan yang fiskus miliki lebih banyak pada peran seorang pemeriksa. Padahal untuk menjaga agar wajib pajak tetap patuh terhadap kewajiban perpajakannya dibutuhkan peran yang lebih dari sekedar pemeriksa Panggabean (2002). Sehingga ketika fiskus mampu memberikan pelayanan yang baik maka WP akan semakin patuh untuk membayarkan pajaknya. Maka hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut:

**Ha4: Kualitas pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak sesuai PP No. 23 tahun 2018.**

**2.17.5. Kesadaran, pengetahuan dan pemahaman, sanksi denda serta kualitas pelayanan fiskus berpengaruh terhadap Wajib Pajak UMKM**

Menurut Widayati dan Nurlis (2010), kesadaran merupakan unsur dalam manusia dalam memahami realitas dan bagaimana cara bertindak atau menyikapi terhadap realitas. Kesadaran yang dimiliki oleh manusia kesadaran dalam diri, akan diri sesama, masa silam, dan kemungkinan masa depannya.

Menurut Widayati dan Nurlis (2010), pengetahuan adalah hasil kerja fikir (penalaran) yang merubah tidak tahu menjadi tahu dan menghilangkan keraguan terhadap suatu perkara. Pengetahuan adalah informasi yang diketahui atau disadari oleh seseorang. Dalam pengertian lain, pengetahuan adalah berbagai gejala yang ditemui dan diperoleh



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

manusia melalui pengamatan akal. Pengetahuan muncul ketika seseorang menggunakan akal budinya untuk mengenali benda atau kejadian tertentu yang belum pernah dilihat atau dirasakan sebelumnya (Utami, dkk., 2012).

Sanksi adalah hukuman negatif kepada orang yang melanggar peraturan, dan denda adalah hukuman dengan cara membayar uang karena melanggar peraturan dan hukum yang berlaku, sehingga dapat dikatakan bahwa sanksi denda adalah hukuman negatif kepada orang yang melanggar peraturan dengan cara membayar uang.

Kualitas pelayanan fiskus terhadap wajib pajak menjadi suatu hal yang penting dalam kesadaran wajib pajak untuk mau membayar pajak. Oleh sebab itu meningkatkan kualitas pelayanan fiskus terhadap wajib pajak menjadi hal utama. Terlebih bagi para pelaku UMKM yang merasa kurang mengerti alasan pemerintah mengenakan tarif final 0,5% setelah munculnya peraturan terbaru yaitu PP No. 23 tahun 2018 yang berlaku efektif 1 Juli 2013. Maka hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut:

**Ha5. kesadaran, pengetahuan dan pemahaman, sanksi denda serta kualitas pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan WP dalam membayar pajak sesuai PP No. 23 tahun 2018.**

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1. Jenis Penelitian

Ditinjau dari metode pengambilan datanya, maka penelitian ini merupakan penelitian survei. Survei atau lengkapnya *self administred survey* adalah metode pengumpulan data primer dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada responden individu. ( Hartono, 2014)

#### 3.2. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir, Penelitian ini dimulai dari bulan Maret sampai dengan selesai.

#### 3.3. Populasi dan Sampel

##### 3.3.1. Populasi

Menurut Usman dan Akbar (2009: 42) Populasi ialah semua nilai baik hasil perhitungan maupun pengukuran, baik kuantitatif maupun kualitatif, dari pada karakteristik tertentu mengenai sekelompok objek yang lengkap dan jelas. Populasi dalam penelitian ini terdiri dari seluruh wajib pajak perseorangan maupun badan pemilik UMKM di Kabupaten Indragiri Hilir yang berjumlah 8.378.

##### 3.3.2. Sampel

Menurut Hartono (2014). Sampel penelitian adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Medode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengambilan sampel berbasis pada Nonprobabilitas (pemilihan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

nonrandom), yaitu Purposive Sampling pengambilan (purposive sampling) dilakukan dengan mengambil sampel dari populasi berdasarkan suatu criteria tertentu.

Dalam menentukan ukuran sampel peneliti menggunakan rumus *slovin*. Adapun rumus yang digunakan sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Keterangan:

n= jumlah sampel

N= jumlah populasi

E= Toleransi 10%

Jika jumlah seluruh populasi dimasukan dengan rumus *slovin* maka hasilnya adalah sebagai berikut:

$$n = 8.378 / 1 + (8378 \times 0,1)^2$$

$$n = 98,82$$

Dari perhitungan rumus *slovin* diatas jumlah sampel dalam penelitian ini adalah sebesar 98,82 dan dibulatkan menjadi 99. Jadi, jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 99 wajib pajak pemilik Usaha Mikro Kecil dan Menengah baik perseorangan maupun badan.

### 3.4. Jenis dan Sumber Data

#### 3.4.1. Data primer

Menurut Sangadji (2010: 44) Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli/tidak media perantara. Data primer dapat berupa opini subyek (orang) secara individu atau kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda (fisik), kejadian atau



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kegiatan, dan hasil pengujian. Data primer dalam penelitian ini berupa kuesioner yang dibagikan kepada responden.

### 3.4.2. Data sekunder

Menurut Sangadji (2010: 45) Data sekunder adalah data yang telah dikumpulkan oleh pihak lain. Data sekunder berupa data catatan-catatan manual, laporan keuangan, laporan penerimaan perpajakan serta bukti-bukti pendukung lainnya. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai buku, jurnal, artikel, internet dan penelitian-penelitian sebelumnya.

### 3.5. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan cara membagikan angket kepada responden. Menurut Usman dan Hasan (2009: 57) Angket adalah daftar pernyataan atau pertanyaan yang dikirimkan kepada responden, baik secara langsung atau tidak langsung atau tidak langsung (melalui pos atau perantara). Responden yang dimaksud adalah wajib pajak UMKM badan atau perseorangan, responden yang diambil untuk penelitian ini sebanyak 99 responden baik untuk responden Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang berbentuk badan maupun perorangan.

### 3.6. Operasional Variabel dan Pengukuran Variabel

Variabel independen (bebas) adalah variabel yang mempengaruhi, menjelaskan atau menerangkan variabel lainnya. (Yusuf, 2014: 109). Variabel dependen (terikat) merupakan variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat karena adanya variabel lain. (Serigar, 2013) Pada penelitian ini ada 4 variabel

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

independen dan 1 variabel dependen yang kemudian variabel-variabel ini diukur oleh indikator-indikator dalam bentuk pertanyaan dengan skala likert.

Menurut Siregar (2013) skala likert adalah skala yang dapat digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang tentang suatu objek atau fenomena tertentu.

### 3.6.1. Variabel dependen

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah tingkat kepatuhan Wajib Pajak UMKM dalam membayar pajak sesuai PP No. 46 (Y). Kepatuhan perpajakan didefinisikan sebagai “suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya”. Indikator dari variabel ini adalah: Kepatuhan formal dan Kepatuhan material. Variabel ini diukur dengan menggunakan *skala likert*, dimana untuk setiap pertanyaan disediakan 5 kategori jawaban dari sangat setuju (1), tidak setuju (2), kurang setuju (3), setuju (4) sampai dengan sangat setuju (5).

### 3.6.2. Variabel independen

#### 1. Kesadaran membayar pajak (X1)

Kesadaran adalah kondisi dimana seorang individu memiliki kendali penuh terhadap stimulus internal maupun stimulus eksternal dengan kata lain kesadaran adalah keadaan seseorang mengetahui atau mengerti, sedangkan perpajakan adalah perihal pajak. sehingga kesadaran perpajakan adalah keadaan mengetahui atau mengerti perihal pajak. Indikator dari variabel ini

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adalah: Menjalankan hak dan kewajiban perpajakan sebagai warga Negara yang baik dan Melaksanakan kewajiban perpajakan tanpa adanya paksaan. Variabel ini diukur dengan menggunakan *skala likert*, dimana untuk setiap pertanyaan disediakan 5 kategori jawaban dari sangat setuju (1) tidak setuju (2) kurang setuju (3) setuju (4) sampai dengan sangat setuju (5).

**2. Pengetahuan dan pemahaman tentang PP No. 23 Tahun 2018 (X2)**

Pengetahuan adalah hasil kerja fikir (penalaran) yang merubah tidak tahu menjadi tahu dan menghilangkan keraguan terhadap suatu perkara. Indikator dari variabel ini adalah: Pengetahuan mengenai pajak, Pengetahuan mengenai peraturan pajak yang berlaku, Pengisian SPT dengan benar dan ketepatan dalam memberikan data dan informasi yang dapat dipertanggung jawabkan. Variabel ini diukur dengan menggunakan *skala likert*, dimana untuk setiap pertanyaan disediakan 5 kategori jawaban dari sangat setuju (1) tidak setuju (2) kurang setuju (3) setuju (4) sampai dengan sangat setuju (5).

**3. Sanksi denda (X3)**

Sanksi denda menurut Devano dan Rahayu dalam buku perpajakan konsep, teori dan isu adalah sanksi administrasi yang dikenakan terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan kewajiban pelaporan. Indikator dari variabel ini adalah: Denda apabila SPT tidak disampaikan atau terlambat disampaikan, Sanksi bunga untuk



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atas jumlah pajak terutang tidak atau kurang bayar dan Sanksi pidana karna kealpaannya. Variabel ini diukur dengan menggunakan *skala likert*, dimana untuk setiap pertanyaan disediakan 5 kategori jawaban dari sangat setuju (1) tidak setuju (2) kurang setuju (3) setuju (4) sampai dengan sangat setuju (5).

#### 4. Pelayanan fiskus (X4)

kualitas pelayanan merupakan suatu kondisi dinamis yang berpengaruh dengan produk, jasa, manusia, proses dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan. Indikator dari variabel ini adalah: Keandalan, Jaminan, Responsif dan Berwujud. Variabel ini diukur dengan menggunakan *skala likert*, dimana untuk setiap pertanyaan disediakan 5 kategori jawaban dari sangat setuju (1) tidak setuju (2) kurang setuju (3) setuju (4) sampai dengan sangat setuju (5).

**Tabel 3.1**

**Operasional Variabel Dan Pengukuran Variabel**

Variabel	Demensi	Indikator	Skala
<b>Kesadaran Wajib Pajak</b> (Sumber: Rahmatika, 2010)	Kesadaran wajib pajak dalam melaporkan pajaknya	a. Menjalankan hak dan kewajiban perpajakan sebagai warga Negara yang baik. b. Melaksanakan kewajiban perpajakan tanpa adanya paksaan.	Skala Likert
<b>Pengetahuan dan Pemahaman Wajib Pajak</b> (Sumber: Wicoksono, 2016)	Pengetahuan dan pemahaman wajib pajak mengenai perpajakan	a. Pengetahuan mengenai pajak. b. Pengetahuan mengenai peraturan pajak yang berlaku. c. Pengisian SPT dengan benar. d. Ketepatan dalam memberikan data dan informasi yang dapat dipertanggung jawabkan.	Skala Likert
<b>Sanksi Denda</b>	Sanksi denda yang di berikan	a. Denda apabila SPT tidak disampaikan atau terlambat	Skala Likert

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<b>(Sumber: Alfiah, 2014)</b>	kepada wajib pajak terhadap pelanggaran perpajakan	disampaikan. b. Sanksi bunga untuk atas jumlah pajak terutang tidak atau kurang bayar. c. Sanksi pidana karna kealpaannya.	
<b>Kualitas Pelayanan Fiskus (Sumber: Albari, 2009)</b>	Kualitas pelayanan petugas pajak dalam melayani wajib pajak	a. Keandalan. b. Jaminan. c. Responsif. d. Berwujud.	Skala Likert
<b>Kepatuhan Membayar Pajak (Sumber: Alfiah 2014)</b>	Kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak	a. Kepatuhan formal. b. Kepatuhan material.	Skala Likert

Sumber: Data Diolah 2018

### 3.7. Metode Analisis Data

#### 3.7.1 Statistik deskriptif

Menurut Sugiyono (2009, 29) Statistik deskriptif adalah statistik yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti, melalui data sampel atau populasi sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum Statistik deskriptif juga memberikan gambaran suatu data yang dilihat dari mean, standar devinisi, minimum, sum, range, kurtosis dan skewness.

#### 3.7.2. Uji validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dinyatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut, atau dengan kata lain uji validitas ingin mengukur

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

apakah pertanyaan dalam kuesioner yang sudah kita buat betul-betul dapat mengukur apa apa yang hendak kita ukur. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mengukur validitas, dalam penelitian uji validitas yang digunakan yaitu analisis *pearson correlations*. Jika korelasi antara masing-masing indikator variabel terhadap total *contruts* variabel menunjukkan nilai positif dan hasil yang signifikan, maka dinyatakan valid. (Ghozali, 2013)

**3.7.3. Uji reliabilitas**

Reliabilitas sebenarnya adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk, suatu kuesioner dapat dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten dan konstruk. Pada penelitian ini pengukuran reliabilitas dilakukan dengan cara *one shot* atas pengukuran sekali saja, dimana pengukurannya hanya dilakukan sekali dan hasilnya dibandingkan dengan pertanyaan lain atau mengukur korelasi antar jawaban pertanyaan. Untuk melihat reliabel atau tidaknya suatu konstruk (variabel) dilakukan dengan cara melihat nilai *Cronbach Alpha* yang ditentukan oleh program SPSS. Menurut Nunnally (1960) dalam Ghozali (2006) suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai *Cronbach Alpha*  $> 0.60$ .

**3.7.4. Uji normalitas**

Uji normalitas tujuannya terhadap serangkaian data adalah untuk mengetahui apakah populasi data berdistribusi normal atau tidak. (Siregar, 2014: 153) Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi data normal



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atau mendekati normal. Uji normalitas dideteksi dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal dari grafik normal plot dan dengan melihat histogram dari residualnya. Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya maka data menunjukkan pola distribusi normal sehingga model regresi memenuhi asumsi normalitas. Alat uji normalitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis (*Normal P-P Plot*), Uji *One Sample Kolmogorov* (Uji *K-S*), dan Histogram. Dimana hasil yang tidak signifikan dari taraf alfa 0,05 menunjukkan variabel-variabel tersebut normal. Selain itu juga analisis terhadap grafik histogram untuk menilai kenormalan data. (Ghozali, 2013)

**3.7.5. Uji asumsi klasik**

Model regresi dapat disebut sebagai model yang baik jika model tersebut memenuhi asumsi normalitas data dan terbebas dari asumsi klasik statistik. Jika model regresi telah memenuhi pengujian dasarnya untuk persyaratan uji asumsi klasik berarti persamaan yang dihasilkan tersebut dapat dijadikan sebagai alat estimasi yang diandalkan untuk peramalan. (Ghozali, 2013).

**3.7.6. Uji multikolinieritas**

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditentukan adanya korelasi di antara variabel independen. Jika variabel independen saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak ortogonal.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Variabel ortogonal adalah variabel independen yang dinilai korelasi antar sesama variabel independen sama dengan nol.

Pada penelitian ini multikolinieritas dilihat dari *tolerance* dan lawannya yaitu *Variance Inflation Factor* (VIF). Nilai *tolerance* yang rendah harus sama dengan nilai VIF tinggi sebab  $VIF = 1/tolerance$ . Menurut Ghozali (2006) *cut-off* yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinieritas adalah nilai *tolerance*  $\geq 0.10$  atau sama dengan  $VIF \geq 10$ . Jika nilai tersebut dapat dipenuhi maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinieritas antar variabel independen dalam model regresi. (Ghozali, 2013)

### 3.7.7. Uji heterokedastisitas

Uji heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas, namun jika berbeda disebut heterokedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heterokedastisitas. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya heterokedastisitas, cara yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melihat grafik plot antara nilai prediksi variabel dependen dengan residualnya, deteksi ada tidaknya heterokedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada atau tidaknya pola tertentu pada grafik *scatterplot* dengan dasar analisis sebagai berikut: a) jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit),

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

maka mengindikasikan telah terjadi heterokedastisitas, b) jika tidak ada pola yang jelas, serta titi-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heterokedastisitas. (Ghozali, 2013).

### 3.8. Pengujian Hipotesis

#### 3.8.1. Uji regresi linear berganda

Analisis ini pada dasarnya studi mengenai ketergantungan variabel dependen (terikat) dengan satu atau lebih variabel independen (variabel penjelas/bebas), dengan tujuan untuk mengestimasi dan atau memprediksi rata-rata variabel dependen berdasarkan nilai variabel independen yang diketahui. Uji hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda dengan menggunakan program *SPSS for Windows*. Pengujian-pengujian tersebut didasarkan pada persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \epsilon$$

Keterangan:

Y : Tingkat kepatuhan Usaha Mikro Kecil dan Menengah UMKM Terhadap PP No 46 Tahun 2013

$\alpha$  : Konstanta

$\beta X$  : Koefisien Regresi

X1 : Variabel Kesadaran membayar pajak

X2 : Variabel Pengetahuan dan Pemahaman WP UMKM

X3 : Variabel Sanksi Denda

X4 : Variabel Kualitas Pelayanan Fiskus



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

$e$  : Error term, nilai kesalahan observasi disamakan nol.

**3.8.2. Uji parsial (uji t)**

Parsial *test* atau uji  $t$  dilakukan untuk menguji secara parsial pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Pengujian dilakukan dengan menggunakan pengujian dua sisi yaitu membandingkan antara  $t$  hitung dengan  $t$  tabel.

**3.8.3. Uji simultan (uji F)**

Uji simultan atau uji  $F$  bertujuan untuk melihat apakah variabel independen secara bersama-sama (simultan) berpengaruh terhadap variabel dependen. Pengujian dilakukan dengan pengujian dua sisi yaitu membandingkan antara  $t$  hitung dengan  $t$  tabel, sehingga  $H_a$  akan diterima apabila nilai  $t$  hitung  $> t$  tabel dengan *significance level* 0,05 ( $\alpha=5\%$ ), penerimaan atau penolakan hipotesis dilakukan dengan kriteria sebagai berikut:

- 1) Jika nilai signifikan  $> 0,05$  maka hipotesis ditolak (koefisien regresi tidak signifikan). Ini berarti bahwa secara parsial variabel independen tersebut tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen;
- 2) Jika nilai signifikan  $\leq 0,05$  maka hipotesis diterima (koefisien regresi signifikan). Ini berarti secara parsial variabel independen mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**3.8.4. Uji koefisien determinasi**

Koefisien determinasi pada intinya mengukur seberapa jauh presentase variasi variabel independen yang digunakan dalam model mampu menjelaskan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara 0 dan 1. Nilai yang kecil berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. (Ghozali, 2013)

Rumus:  $KD: R \times 100\%$

Jika nilai KD semakin mendekati 1 maka semakin baik kemampuan model tersebut dalam menjelaskan variabel independen.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

## 4. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan dan pemahaman, sanksi denda, kualitas pelayanan piskus terhadap kepatuhan membayar pajak pada sektor usaha mikro kecil dan menengah. Responden penelitian ini berjumlah 99 orang pemilik usaha mikro kecil dan menengah yang terlibat di kabupaten Indragiri hilir (INHIL). Berdasarkan dari data yang telah dikumpulkan dan pengujian yang telah dilakukan terhadap permasalahan dengan menggunakan model regresi berganda, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. tingkat kesadaran wajib pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak pada sektor usaha mikro kecil dan menengah. Hasil penelitian ini mendukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Ready Wicaksono (2016) yang menyatakan bahwa tingkat kesadaran wajib pajak tidak terlalu pengaruh terhadap motivasi memenuhi membayarpajak.
2. Pengetahuan dan pemahaman berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak pada sektor usaha mikro kecil dan menengah. Hasil penelitian ini mendukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Zulia Husna (2009) yang menyatakan bahwa pengetahuan dan pemahaman tidak terlalu berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Sanksi denda berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak pada sektor usaha mikro kecil dan menengah. Hasil penelitian ini mendukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Febirizki Damayanty, dkk (2016) yang menyatakan bahwa sanksi denda berpengaruh terhadap sanksi denda berpengaruh terhadap kepatuhan.
4. Kualitas pelayanan fiskus berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak pada sektor usaha mikro kecil dan menengah. Hasil penelitian ini mendukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Utami, dkk (2012) yang menemukan bahwa kualitas pelayanan memiliki pengaruh positif dan signifikan dengan tingkat kepatuhan.
5. Kepatuhan wajib pajak, pengetahuan dan pemahaman, sanksi denda, kualitas pelayanan fiskus berpengaruh secara simultan dan signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak pada sektor usaha mikro kecil dan menengah. Hasil penelitian signifikan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mufti Rahmatika (2010).

**5.1. Keterbatasan Penelitian**

1. Variabel independen yang digunakan untuk mempengaruhi kepatuhan membayar pajak dalam penelitian ini hanya 4 variabel, yaitu kesadaran wajib pajak, pengetahuan dan pemahaman, sanksi denda, dan kualitas pelayanan fiskus. Dari hasil analisis koefisien determinasi, ditemukan hasil sebesar 0,737. Hasil ini dapat diartikan bahwa besarnya variabel

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

independen dalam menjelaskan variabel dependen adalah 52,3%.

Sedangkan sisanya 48,7% dipengaruhi variabel lain diluar penelitian.

2. Penelitian ini hanya menggunakan populasi hanya pada wajib pajak usaha mikro kecil dan menengah yang berada di kabupaten Indragiri hilir.

**5.2. Saran**

Saran-saran yang diberikan untuk penelitian selanjutnya adalah sebagai berikut:

1. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah variabel independen lainnya, untuk mengetahui variabel-variabel lain yang dapat mempengaruhi dan memperkuat atau memperlemah variabel dependen.
2. Untuk penelitian selanjutnya yang tetarik dengan penelitian yang sama dapat menambahkan atau memperluas populasi tidak hanya dalam satu kabupaten Indragiri hilir saja, tetapi dapat diperluas hingga satu provinsi. Sehingga dapat menggeneralisasikan hasil penelitian ini.
3. Penelitian selanjutnya diharapkan untuk menambah jumlah responden yang akan dijadikan sampel, karena semakin banyak jumlah responden yang akan digunakan maka akan diperoleh hasil penelitian dengan tingkat generalisasi yang lebih tinggi.
4. Untuk penelitian selanjutnya pertanyaan dalam kuensioner harus disesuaikan dengan responden.



## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Quran dan Terjemahannya*. Bandung: Gema Risalah Press Bandung.
- Agustinus, dkk. 2011. *Faktor Pajak & Masa PPN*. Yogyakarta.
- Arabella Oentari Fuadi dkk. (2013). *Pengaruh Kualitas Pelayanan Petugas Pajak, Sanksi Perpajakan Dan Biaya Kepatuhan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM*. Tax & Accounting Review. Vol. 1 No. 1.
- Bata, J.D. (2017). *Pengaruh Tingkat Kepuasan Pelayanan, Pemahaman Perpajakan, Keadilan Perpajakan, Sanksi Perpajakan Dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kpp Pratama Senapelan Pekanbaru*. Skripsi
- Djp, (2018). *Dari PP 46/2013 Hingga PP 23/2018*.  
<https://www.pajak.go.id/artikel/dari-pp-462013-hingga-pp-232018>).
- Cahyonowati, Nur, dkk. (2012). *Peranan Etika, Pemeriksaan, dan Denda Pajak untuk Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia, Vol. 9 No 2.
- Fejriyan dkk. (2015). “*Pengaruh Persepsi Pelaksanaan Sensus Pajak Nasional, Sikap Wajib Pajak Pada Pelaksanaan Sanksi Denda Dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kelurahan Miji Mojokerto)*”. Jurnal Perpajakan Vo. 1, No. 1, 2015
- Ghozali, Imam. (2013). *Aplikasi Analisis multivariate dengan Program IBM SPSS 21*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Ghozali, Imam. (2013). *Aplikasi Analisis multivariate dengan Program IBM SPSS 21*. Semarang: Universitas Diponegoro.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- Ghozali, Imam. (2009). *Apakah Multivariate Program SPSS*. Universitas Diponegoro.
- Gusfahmi. (2011). *Pajak Dalam Islam*. Jakarta : Jurnal Rajawali Pers.
- Hanum, Zulia. 2009. *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Usaha Kecil Menengah dalam Pelaporan Kewajiban Perpajakan di Kota Medan*. Medan: Jurnal Ilmiah Kultura ISSN, Vol. 10, No 1.
- Jayanto, Yudo Frobowo. 2011. *Faktor-Faktor Ketidakpatuhan Wajib Pajak*. Semarang: Jurnal Dinamika Manajemen, Vol. 2, No. 1.
- Kemala, Winda. 2015. *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sikap Wajib Pajak dan Reformasi Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor*. Jurnal Fekon Vol. 2, No. 1.
- Kemala, Winda. 2015. *Pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus dan Sikap Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak (Studi Kasus pada WPOP di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jepara)*. Pekanbaru: Jurnal Fekon Vol. 2, No. 1.
- Ledy Puspitasari. (2015). *Pengaruh kesadaran wajib pajak, tingkat pemahaman wajib pajak, pelayanan fiskus dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak (studi empiris pada pengusaha UMKM di KPP Pratama Senapelan)*. Jom Fekon Vol. 2. No. 2.
- Labis, Irwansyah, dkk. 2010. *Reviw Pajak*. Jakarta: Selemba Empat, No. 101.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan edisi revisi*. Yogyakarta: penerbit andi.
- Marsuki. *Strategi Memberdayaan Sektor Ekonomi UMKM di Indonesia*. Sulawesi Selatan: Mitra Wacana Media.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- Mufti Rahmatika. 2010. *Analisis Factor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Kesadaran Kewajiban Perpajakan Pada Sektor Usaha Kecil Dan Menengah*. Jurnal Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013. *Tentang Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu*.
- Prawagis, Damayanty Febirizki, dkk. 2016. *Pengaruh Pemahaman Atas Mekanisme Pembayaran Pajak, Persepsi Tarif Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM*. (Studi pada Wajib Pajak yang Terdaftar di KPP Pratama Bantul). Universitas Brawijaya: Jurnal Perpajakan (JEJAK), Vol. 10, No. 1.
- Pratiwi dan Setiawan. (2014). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Kondisi Keuangan Perusahaan, Dan Persepsi Tentang Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Reklame Di Dinas Pendapatan Kota Denpasar*. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana.
- Sari, Rafika. 2018. *Kebijakan Insentif Pajak Bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah*. Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI.
- Rahmatika, Mufti. 2010. *Analisis Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Kesadaran Kewajiban Perpajakan pada Sektor Usaha Kecil dan Menengah*. Jakarta: Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Rajif, M. 2012. *Pengaruh Pemahaman, Kualitas Pelayanan, dan Ketegasan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pajak Pengusaha UKM di Daerah Cirebon*. Publication Gunadarma.ac.id.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Rantung dan Adi. 2009. *Dampak Program Sunset Policy Terhadap Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak*. Madura: Jurnal Simposium Nasional Perpajakan II.

Ritonga, Pandapotan. 2011. *Analisis Pengaruh Kesadaran dan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Kinerja Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Dengan Pelayanan Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening Di KPP Medan Timur Universitas Islam Sumatera Utara, Medan*.

Roseline dan Rusydi. 2013. *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Mengukuhkan Diri Sebagai Pengusaha Kena Pajak*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya.

Resmi, Siti. 2011. *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Selemba Empat, Jakarta.

Suhendra, Euphrasia Susi. (2010). *Pengaruh Tingkat Kepatuhan Pajak Badan Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Penghasilan Badan*. Jurnal Ekonomi Bisnis No. 1. Volume 15. Depok : Universitas Gunadharma.

Sugiyono. 2009. *Statistika Untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.

Sulistyawati dan Poerwati. 2012. *Faktor-Faktor Kemauan Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas di KPP Semarang Barat*. Student Journal of Accounting and Banking. Unisbank.

Sisilo dan Sirajudin, 2014. *Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Pajak UKM (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Yang Terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat)*. Eprints. Mdp.





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Tambunan, R. 2016 . *Ketentuan Terbaru Pajak Penghasilan atas UMKM: Sederhana Tapi Tidak Adil*. Retrieved from <http://www.ortax.org/?Mod=issue&page=show&id=51&q=&hlm=1.10>
- Theidi, 2016. *Manfaat Pajak Sangat Vital Bagi Kelangsungan Hidup Suatu Negara* <https://thidiweb.com/unsur-dan-manfaat-pajak/>
- Utami, Andi Soerono. 2012. *Pengaruh Faktor-faktor Eksternal Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak di Lingkungan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Serang*. Simposium Nasional Akuntansi 15, Universitas Sultan Agung Tirtayasa.
- Utami dan Kardinal. (2013). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Seberang Ulu*. STIE MDP.
- Wicaksono, Ready. 2016. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam Membayar Pajak Sesuai PP No.46 Tahun 2013 Pada UMKM di Kabupaten Bantul*. Bantul: Jurnal Fokus Bisnis, Volume 15, No 02.
- Widayati dan Nurlis. (2010). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Untuk Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas*. Purwokerto: Simposium Nasional Akuntansi 13, Universitas Jenderal Sudirman.
- Dewinta, Rinta Mulia dan Muchamad Syafruddin. (2012). *Pengaruh Persepsi Pelaksanaan Sensus Pajak Nasional Dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta*. Diponogoro Jurnal Of Accounting Volume 1.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Y.S., Darma Surya. 2017. *Pengaruh Pemahaman, Kesadaran, Tingkat Pendidikan Sosialisasi Terhadap Kepatuhan Pelaku UMKM di Pekanbaru dalam Melaksanakan Kewajiban Perpajakan (Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013)*. Pekanbaru: Skripsi Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.



UIN SUSKA RIAU



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

# LAMPIRAN

UIN SUSKA RIAU





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF QASIM RIAU**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL / JURUSAN AKUNTANSI**

**PENGANTAR**

Dalam rangka penyelesaian tugas akhir sebagai mahasiswa program strata satu (S1) Universitas Islam Negeri (UIN) SUSKA RIAU, saya:

NAMA : M. RAMA  
NIM : 11473102208  
FAK/JUR : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL/AKUNTANSI S1

Bermaksud melakukan penelitian ilmiah untuk penyusunan skripsi dengan judul **“Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Dalam Membayar Pajak Sesuai PP No. 46 Tahun 2013 pada UMKM di Kabupaten Indragiri Hilir (INHIL)”**

Sehubungan dengan hal tersebut saya sangat mengharapkan kesediaan Bapak/Ibu/Saudara untuk meluangkan waktu sejenak untuk mengisi beberapa pertanyaan pada kuesioner ini. Data yang diperoleh hanya akan digunakan untuk kepentingan penelitian dan tidak untuk digunakan sebagai penelitian kinerja ditempat Bapak/Ibu/Saudara bekerja, sehingga saya akan menjaga kerahasiaan sesuai dengan kode etika penelitian.

Peneliti sangat mengharapkan kepada semua pihak yang terpilih sebagai responden dalam penelitian ini dapat berkerja sama dalam memberikan informasi serta jawaban atas pertanyaan secara benar, jujur, dan objektif. Tidak ada jawaban



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang salah atau benar dalam pilihan saudara, karena tujuan kuensioner ini adalah untuk meminta persepsi/pendapat saudara.

Terimakasih atas kesediaan Bapak/Ibu/Saudara meluangkan waktu untuk mengisi kuesioner guna membantu kelancaran penelitian ini.

### Karakteristik Responden :

Berilah tanda ( ✓ ) atau ( X ) sesuai dengan jawaban yang dipilih.

Nama responden :

Jenis kelamin : ☐ laki laki ☐ perempuan

Usia : ☐ 20 tahun - 30 tahun

☐ 31 tahun - 40 tahun

☐ 41 tahun – 50 tahun

Pendidikan terakhir : ☐ SD ☐ SMP ☐ SMA

☐ D3 ☐ S1 ☐ lainnya

Lama usaha : ☐ <2 tahun ☐ 2-4 tahun ☐ 4-6 tahun

☐ 6-8 tahun ☐ > 8 tahun

Laba bersih sebulan : ☐ < Rp 5.000.000

☐ Rp 5.000.000-Rp. 10.000.000

☐ Rp. 10.000.000-Rp. 15.000.000

☐ Rp. 15.000.000-Rp. 20.000.000

☐ Rp. >20.000.000



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

petunjuk pengisian kuesioner

berilah tanda (✓) atau (X) pada kotak yang tersedia untuk masing-masing jawaban pernyataan kuesioner sesuai dengan yang saudara rasakan, tiap pernyataan hanya boleh ada satu jawaban.

STS = sangat tidak setuju

TS = tidak setuju

KS = kurang setuju

S = setuju

SS = sangat setuju

**KUESIONER PENELITIAN**

No	Item Pernyataan	Alternatif Jawaban				
		STS	TS	KS	S	SS
Kesadaran Wajib Pajak (X1)						
1	Wajib pajak telah menggunakan tariff pajak yang sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku					
2	Setiap pengusaha wajib mempunyai nomor pokok wajib pajak (npwp)					
3	Wajib pajak mempunyai hak dalam membetulkan SPT					
4	Wajib pajak mempunyai kewajiban dalam melaporkan jumlah pajak terutang					
5	Wajib pajak berhak mengajukan permohonan pengambilan (restetusi pajak) atas kelebihan pembayaran pajak berdasarkan peraturan yang berlaku					
6	Setiap pngusaha harus melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak					
7	Pemberian reward dan punishment diperlukan guna meningkatkan kesadaran pembayaran perpajakan oleh pengusaha					
8	Setiap wajib pajak harus mendaptarkan diri ke kantor pelayanan pajak yang berada diwilayah kerjanya					

Sumber: Mufti Rahmatika, (2010)

Sumber: Mufti Rahmatika, (2010)





### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Pengetahuan dan Pemahaman (X2)

9	Wajib pajak harus mempunyai pengetahuan mengenai peraturan perpajakan					
10	Wajib pajak sebagai penghitung jumlah pajak yang terutang					
11	Wajib pajak menggunakan tarif pajak yang sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku					
12	Wajib pajak mengetahui informasi terbaru tentang pajak					
13	Semakin tinggi tingkat pendidikan wajib pajak semakin luas pengetahuan wajib pajak mengenai peraturan yang berlaku					
14	Wajib pajak harus mempunyai pengetahuan mengenai pp. no 46 tahun 2013					
15	Wajib pajak memiliki kemampuan menghitung pajak yang terhutang dengan benar					
16	Wajib pajak harus mempunyai kemampuan untuk mengisi surat pemberitahuan (SPT)					

Sumber: Mufti Rahmatika, (2010)

#### Saanksi Denda (X3)

17	Sanksi dalam SPT sangat diperlukan.					
18	Denda Rp. 100.000 adalah wajar					
19	Sanksi administrasi berupa denda 50% dari pajak yang kurang dibayar, apabila pengisian SPT (Surat Pemberitahuan) dilakukan dengan tidak benar.					
20	Denda keterlambatan pelaporan SPT (Surat Pemberitahuan) Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi adalah Rp. 100.00,-					
21	Membayar kekurangan pajak penghasilan sebelum dilakukan pemeriksaan dari aparat pajak.					
22	Mengisi SPT sesuai dengan peraturan yang berlaku.					
23	Melakukan evaluasi secara berkala untuk mengantisipasi adanya pemeriksaan dari aparat.					
24	Pengenaan sanksi denda cukup berat merupakan sarana mendidik wajib pajak.					

Sumber: Artitiastuti Mipraningsih Dan Irma Alfiah, (2014)



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau

Kualitas Pelayanan Fiskus (X4)					
25	Petugas pajak sudah bekerja secara profesional untuk meningkatkan kepercayaan wajib pajak.				
26	Petugas pajak cakap dalam melaksanakan tugas				
27	Petugas pajak selalu menindaklanjuti pengaduan dari masyarakat dengan cepat.				
28	Petugas pajak cepat tanggap dalam membantu menyelesaikan persoalan yang dihadapi wajib pajak.				
29	Petugas pajak menguasai peraturan perpajakan dengan baik sehingga dapat membantu wajib pajak dalam menyelesaikan kewajiban pajaknya.				
30	Petugas pajak menjaga kerahasiaan data dari masing-masing wajib pajak.				
31	Petugas pajak memberikan pelayanan yang terbaik.				
32	Petugas pajak memberikan perhatian terhadap masalah yang dialami wajib pajak terkait pembayaran pajak.				
Sumber: Monica Dwi Cahyanti, (2017)					
Kepatuhan Membayar Pajak (Y)					
33	Pajak ditetapkan dengan Undang-Undang (UU) dan dapat dipaksa				
34	Pajak merupakan bentuk pengabdian masyarakat kepada Negara				
35	Membayar pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan Negara				
36	Penundaan pembayaran pajak dan pengurangan pajak dapat merugikan Negara				
37	Pembayaran pajak yang tidak sesuai akan berakibat pada kerugian yang akan ditanggung Negara				
38	Membayar pajak akan terbentuk rencana untuk kemajuan kesejahteraan rakyat				
39	Dengan adanya pengawasan yang dilakukan oleh KPP akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak				
40	Wajib pajak selalu menyampaikan SPT ke kantor pajak tepat waktu sebelum batas akhir penyampaian SPT				

Sumber: Irma Alfiah, (2014) Dan Hana Sifanuri, (2017)





1. Urutur mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel Data Responden									
No	Kasabran Wajit Pajak								Jumlah
	1	2	3	4	5	6	7	8	
1	4	4	4	4	4	4	4	4	31
2	5	5	5	5	5	5	5	5	40
3	5	5	5	5	5	5	5	5	40
4	4	4	4	4	4	4	4	4	32
5	5	5	5	4	5	5	5	5	37
6	5	5	5	5	3	5	5	4	35
7	5	5	5	5	5	5	5	5	40
8	5	5	5	5	5	5	5	5	40
9	5	5	5	5	5	5	5	5	40
10	5	5	5	4	5	4	4	5	37
11	5	5	5	5	5	5	5	5	40
12	5	5	5	4	5	4	4	5	37
13	4	4	4	4	3	5	5	5	34
14	5	5	5	5	3	5	5	5	36
15	4	4	4	4	4	4	4	4	32
16	4	5	5	4	5	5	5	5	38
17	5	5	5	5	5	5	5	5	40
18	5	5	5	5	5	5	5	5	40
19	5	5	5	5	5	5	5	5	40
20	4	5	5	5	5	4	4	4	36
21	5	5	5	5	5	5	5	5	40
22	5	5	5	4	5	5	5	5	39
23	5	5	5	5	5	5	5	5	40
24	4	5	5	4	5	5	5	5	38
25	5	5	5	5	5	3	4	5	35
26	5	5	5	5	5	5	5	5	40
27	4	5	4	5	5	5	4	4	36
28	5	5	5	5	5	5	5	5	40
29	4	4	4	4	4	4	4	4	32
30	5	5	5	5	5	5	5	5	40
31	4	4	4	4	4	4	4	4	32
32	4	5	5	4	5	4	4	4	35

Tabel Data Responden									
No	Pengetahuan dan Pemahaman								Jumlah
	1	2	3	4	5	6	7	8	
1	5	5	5	5	5	5	4	5	39
2	4	4	4	4	4	4	4	4	32
3	5	5	5	5	5	5	5	5	40
4	5	3	5	5	5	5	3	4	35
5	5	3	5	5	5	5	3	5	36
6	4	4	4	4	5	4	4	3	32
7	4	4	5	4	5	4	5	5	36
8	4	3	4	4	5	4	4	5	33
9	5	5	5	5	5	5	5	5	40
10	5	5	5	5	5	5	5	5	40
11	5	5	5	5	5	4	5	5	39
12	5	5	5	5	5	5	5	5	40
13	5	5	5	5	5	5	3	5	38
14	5	5	5	5	5	3	5	4	37
15	5	5	5	4	5	5	4	5	38
16	4	4	4	4	4	4	4	4	32
17	5	5	5	5	5	5	5	5	40
18	4	4	4	4	4	4	4	4	32
19	5	4	5	5	5	5	5	5	39
20	5	5	5	5	5	5	5	5	40
21	5	5	5	5	5	4	5	5	39
22	5	5	5	5	5	5	5	5	40
23	5	5	5	5	5	5	5	5	40
24	5	5	5	5	5	5	5	5	40
25	4	4	3	4	4	3	4	3	29
26	5	5	5	4	4	4	4	4	35
27	4	4	4	4	4	4	4	4	32
28	5	5	5	5	5	5	5	5	40
29	5	5	5	5	5	5	5	5	40
30	4	4	4	4	4	4	4	4	32
31	4	4	4	4	4	4	4	4	32
32	5	5	4	4	5	4	5	5	37

Tabel Data Responden									
No	Saziki Denda								Jumlah
	1	2	3	4	5	6	7	8	
1	4	4	4	4	5	4	5	4	34
2	4	4	4	4	4	4	4	4	32
3	4	4	4	4	4	4	4	4	32
4	4	4	5	4	5	5	4	4	35
5	5	5	5	5	5	5	5	5	40
6	4	4	4	4	4	4	4	4	32
7	4	4	4	4	5	5	4	4	34
8	4	4	4	4	4	4	4	4	32
9	4	4	4	4	4	4	4	4	32
10	4	4	4	4	4	4	4	4	32
11	4	4	4	4	5	4	4	4	33
12	4	4	4	4	4	4	4	4	32
13	4	4	4	4	4	4	4	4	32
14	5	5	5	5	5	5	5	5	40
15	4	4	4	4	4	4	4	4	32
16	4	4	4	4	4	4	4	4	32
17	5	5	5	5	5	5	5	5	40
18	4	4	4	4	4	4	4	4	32
19	4	4	4	4	4	4	4	4	32
20	5	5	5	5	5	5	5	5	40
21	4	4	4	4	4	4	4	4	32
22	5	5	5	5	5	5	5	5	40
23	4	4	4	4	4	4	4	4	32
24	5	5	5	5	5	5	5	5	40
25	4	4	4	4	4	4	4	4	32
26	4	4	4	4	4	4	4	4	32
27	4	4	4	4	4	4	4	4	32
28	4	4	4	4	4	4	4	4	32
29	4	4	4	4	4	4	4	4	32
30	4	4	4	4	4	4	4	4	32
31	4	4	4	4	4	4	4	4	32
32	4	3	3	4	4	5	3	2	28





### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

32	4	5	5	4	5	4	4	4	35
33	5	5	5	5	5	5	5	5	40
34	4	5	5	5	4	5	4	4	35
35	4	4	5	4	5	4	4	4	34
36	4	4	4	4	4	3	5	5	33
37	4	5	5	3	5	4	4	4	34
38	4	5	5	3	4	4	4	3	32
39	4	4	5	5	4	3	5	4	32
40	4	4	4	4	4	5	5	5	35
41	4	4	4	4	4	4	4	4	32
42	4	4	4	4	4	4	4	4	32
43	4	4	4	4	4	4	4	4	32
44	4	4	4	4	4	4	4	4	32
45	4	4	4	4	4	4	4	4	32
46	4	4	4	4	4	4	4	4	32
47	4	4	4	4	4	4	4	4	32
48	4	5	5	5	4	5	5	4	37
49	4	4	4	4	4	5	3	5	33
50	4	4	4	4	4	4	4	4	32
51	4	4	4	4	4	4	4	4	32
52	4	4	4	4	4	4	4	4	32
53	4	4	4	4	4	4	4	4	32
54	4	4	4	4	4	4	4	4	32
55	4	4	4	4	4	4	4	4	32
56	4	4	4	4	4	4	4	4	32
57	4	4	4	5	4	5	4	4	34
58	4	4	4	4	5	4	4	4	33
59	4	4	4	4	4	4	4	4	32
60	4	4	4	4	4	4	4	4	32
61	4	4	4	4	4	4	4	4	32
62	4	4	4	4	4	4	4	4	32
63	4	4	4	4	4	4	4	4	32
64	5	5	5	5	5	5	5	5	40
65	5	5	5	5	5	5	5	5	40
66	5	5	5	5	5	5	5	5	40
32	5	5	4	4	5	4	5	5	37
33	5	4	4	4	5	4	4	5	35
34	5	5	5	5	5	5	5	5	40
35	5	3	4	4	5	4	4	5	34
36	4	4	4	4	4	4	4	4	32
37	5	4	4	4	5	5	5	5	37
38	5	5	3	3	4	4	5	3	32
39	4	3	4	4	3	4	4	5	31
40	4	4	5	5	5	5	5	4	37
41	4	4	4	4	4	4	4	4	32
42	4	4	4	4	4	4	4	4	32
43	4	4	4	4	4	4	4	4	32
44	4	4	4	4	4	4	4	4	32
45	4	4	4	4	4	4	4	4	32
46	4	4	4	4	4	4	4	4	32
47	4	4	4	4	4	4	4	4	32
48	4	5	4	3	5	4	4	5	34
49	5	3	5	4	5	4	5	4	35
50	4	4	4	4	4	4	4	4	32
51	4	4	4	4	4	4	4	4	32
52	4	4	4	4	4	4	4	4	32
53	4	4	4	4	4	4	4	4	32
54	4	4	4	4	4	4	4	4	32
55	4	4	4	4	4	4	4	4	32
56	4	4	4	4	4	4	4	4	32
57	5	4	4	5	5	4	4	4	35
58	4	3	4	5	5	3	4	4	32
59	4	4	4	4	4	4	4	4	32
60	4	4	4	4	4	4	4	4	32
61	4	4	4	4	4	4	4	4	32
62	4	4	4	4	4	4	4	4	32
63	4	4	4	4	4	4	4	4	32
64	5	5	5	5	5	5	5	5	40
65	5	5	5	5	5	5	5	5	40
66	5	5	5	5	5	5	5	5	40
32	4	3	3	4	4	5	3	2	28
33	4	3	3	4	4	5	4	4	31
34	4	3	3	4	4	4	3	3	28
35	3	2	3	4	4	4	3	4	27
36	4	4	4	4	4	4	4	4	32
37	3	4	3	3	4	4	4	4	29
38	4	4	4	4	4	4	3	3	30
39	4	4	4	4	4	4	4	3	31
40	4	4	4	4	4	4	4	3	31
41	4	4	4	4	4	4	4	4	32
42	4	4	4	4	4	4	4	4	32
43	4	4	4	4	4	4	4	4	32
44	4	4	4	4	4	4	4	4	32
45	4	4	4	4	4	4	4	4	32
46	4	4	4	4	4	4	4	4	32
47	4	4	4	4	4	4	4	4	32
48	4	4	4	4	4	4	4	4	32
49	4	4	4	4	4	4	4	4	32
50	4	4	4	4	4	4	4	4	32
51	4	4	4	4	4	4	4	4	32
52	4	4	4	4	4	4	4	4	32
53	4	4	4	4	4	4	4	4	32
54	4	4	4	4	4	4	4	4	32
55	4	4	4	4	4	4	4	4	32
56	4	4	4	4	4	4	4	4	32
57	4	4	4	4	4	4	4	4	32
58	4	4	4	4	4	4	4	4	32
59	4	4	4	4	4	4	4	4	32
60	4	4	4	4	4	4	4	4	32
61	4	4	4	4	4	4	4	4	32
62	4	4	4	4	4	4	4	4	32
63	4	4	4	4	4	4	4	4	32
64	5	5	5	5	5	5	5	5	40
65	5	5	5	5	5	5	5	5	40
66	5	5	5	5	5	5	5	5	40



[illegible]





### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel Data Responden									
No	Kualitas Pelayanan Fokus								Jumlah
	1	2	3	4	5	6	7	8	
1	5	5	4	5	5	5	4	5	38
2	5	5	5	5	5	5	5	4	39
3	5	5	5	5	5	5	5	5	40
4	5	4	5	4	4	4	4	5	35
5	5	5	5	5	5	5	5	5	40
6	4	5	4	4	4	4	4	5	34
7	5	5	5	5	5	5	5	5	40
8	5	5	5	5	5	5	5	5	40
9	5	5	5	5	5	5	5	5	40
10	5	5	5	5	5	5	5	5	40
11	5	5	5	5	5	5	5	5	40
12	5	5	5	5	5	5	4	5	39
13	4	5	4	5	5	5	4	5	37
14	5	5	5	5	5	5	5	5	40
15	4	4	4	4	5	4	5	5	35
16	5	5	5	4	5	5	5	4	38
17	5	5	5	5	5	5	5	5	40
18	5	5	4	5	4	5	4	5	37
19	5	5	5	4	4	5	4	5	37
20	5	5	5	5	4	5	4	5	38
21	5	5	5	4	5	4	4	5	37
22	4	5	5	5	4	5	5	5	38
23	5	4	5	4	5	5	5	5	38
24	5	5	5	5	5	5	4	5	39
25	5	4	5	4	5	5	4	4	36
26	5	5	5	5	5	5	5	4	39
27	4	5	5	5	5	5	5	4	38
28	5	5	5	5	5	5	5	5	40
29	5	4	5	4	5	4	4	5	36
30	4	5	4	4	4	5	4	5	35
31	5	5	4	5	5	4	4	4	36
32	5	4	4	4	4	4	5	5	35

Tabel Data Responden									
No	Kepatuhan Membayar Pajak								Jumlah
	1	2	3	4	5	6	7	8	
1	5	5	4	5	5	5	4	5	38
2	5	5	5	5	5	5	5	4	39
3	5	5	5	5	5	5	5	5	40
4	5	4	5	4	4	4	4	5	35
5	5	5	5	5	5	5	5	5	40
6	4	5	4	4	4	4	4	5	34
7	5	5	5	5	5	5	5	5	40
8	5	5	5	5	5	5	5	5	40
9	5	5	5	5	5	5	5	5	40
10	5	5	5	5	5	5	5	5	40
11	5	5	5	5	5	5	5	5	40
12	5	5	5	5	5	5	4	5	39
13	4	5	4	5	5	5	4	5	37
14	5	5	5	5	5	5	5	5	40
15	4	4	4	4	5	4	5	5	35
16	5	5	5	4	5	5	5	4	38
17	5	5	5	5	5	5	5	5	40
18	5	5	4	5	4	5	4	5	37
19	5	5	5	4	4	5	4	5	37
20	5	5	5	5	4	5	4	5	38
21	5	5	5	4	5	4	4	5	37
22	4	5	5	5	4	5	5	5	38
23	5	4	5	4	5	5	5	5	38
24	5	5	5	5	5	5	4	5	39
25	5	4	5	4	5	5	4	4	36
26	5	5	5	5	5	5	5	4	39
27	4	5	5	5	5	5	5	4	38
28	5	5	5	5	5	5	5	5	40
29	5	4	5	4	5	4	4	5	36
30	4	5	4	4	4	5	4	5	35
31	5	5	4	5	5	4	4	4	36
32	5	4	4	4	4	4	5	5	35





# Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

33	5	5	5	4	4	5	4	5	37
34	4	4	4	4	4	4	4	5	33
35	4	5	5	4	5	5	4	5	37
36	5	5	5	5	4	5	5	4	38
37	4	5	5	5	5	5	4	5	38
38	4	5	5	5	4	4	4	5	36
39	4	5	4	4	4	4	5	5	36
40	5	5	4	4	4	5	5	4	36
41	4	4	4	4	5	4	5	4	34
42	4	4	4	4	4	4	4	4	32
43	4	4	4	4	4	4	4	4	32
44	4	4	5	4	5	5	4	4	35
45	5	5	5	5	5	5	5	5	40
46	4	4	4	4	4	4	4	4	32
47	4	4	4	4	5	5	4	4	34
48	4	4	4	4	4	4	4	4	32
49	4	4	4	4	4	4	4	4	32
50	4	4	4	4	4	4	4	4	32
51	4	4	4	4	5	4	4	4	33
52	4	4	4	4	4	4	4	4	32
53	4	4	4	4	4	4	4	4	32
54	5	5	5	5	5	5	5	5	40
55	4	4	4	4	4	4	4	4	32
56	4	4	4	4	4	4	4	4	32
57	5	5	5	5	5	5	5	5	40
58	4	4	4	4	4	4	4	4	32
59	4	4	4	4	4	4	4	4	32
60	5	5	5	5	5	5	5	5	40
61	4	4	4	4	4	4	4	4	32
62	5	5	5	5	5	5	5	5	40
63	4	4	4	4	4	4	4	4	32
64	5	5	5	5	5	5	5	5	40
65	4	4	4	4	4	4	4	4	32
66	4	4	4	4	4	4	4	4	32
67	4	4	4	4	4	4	4	4	32

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Ri

UIN SUSKA RIAU





### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

67	4	4	4	4	4	4	4	4	4	32
68	4	4	4	4	4	4	4	4	4	32
69	4	4	4	4	4	4	4	4	4	32
70	4	4	4	4	4	4	4	4	4	32
71	4	4	4	4	4	4	4	4	4	32
72	4	3	3	4	4	5	3	2	2	28
73	4	3	3	4	4	5	4	4	4	31
74	4	3	3	4	4	4	3	3	3	28
75	3	2	3	4	4	4	3	4	4	27
76	4	4	4	4	4	4	4	4	4	32
77	3	4	3	3	4	4	4	4	4	29
78	4	4	4	4	4	4	3	3	3	30
79	4	4	4	4	4	4	4	3	3	31
80	4	4	4	4	4	4	4	3	3	31
81	4	4	4	4	4	4	4	4	4	32
82	5	4	5	3	5	3	5	3	3	33
83	5	5	5	5	5	5	5	5	5	40
84	5	5	5	5	5	5	5	5	5	40
85	5	5	5	4	5	4	4	5	5	37
86	4	4	4	4	4	5	5	5	5	35
87	5	5	5	5	5	5	5	5	5	40
88	5	5	5	5	5	5	5	5	5	40
89	5	5	5	5	5	5	5	5	5	40
90	5	5	5	5	5	5	5	5	5	40
91	5	5	5	5	5	5	5	5	5	40
92	5	5	5	5	5	5	5	5	5	40
93	5	5	5	5	5	5	5	5	5	40
94	5	5	5	5	5	5	5	5	5	40
95	5	5	5	5	5	5	5	5	5	40
96	5	5	5	5	5	5	5	5	5	40
97	5	5	5	5	5	5	5	5	5	40
98	5	5	5	5	5	5	5	5	5	40
99	5	5	5	5	5	5	5	5	5	40

67	5	5	5	5	5	5	5	5	5	40
68	5	5	5	5	5	5	5	5	5	40
69	5	5	5	5	5	5	5	5	5	40
70	5	5	5	5	5	5	5	5	5	40
71	5	5	5	5	5	5	5	5	5	40
72	5	5	5	5	5	5	5	5	5	40
73	5	5	5	5	5	5	5	5	5	40
74	5	5	5	5	5	5	5	5	5	40
75	5	5	5	5	5	5	5	5	5	40
76	5	5	5	5	5	5	5	5	5	40
77	5	5	5	5	5	5	5	5	5	40
78	5	5	5	5	5	5	5	5	5	40
79	5	5	5	5	5	5	5	5	5	40
80	5	5	5	5	5	5	5	5	5	40
81	5	5	5	5	5	5	5	5	4	39
82	5	5	5	5	5	5	5	5	5	40
83	4	5	5	5	5	4	5	5	5	38
84	5	5	5	5	4	5	4	5	5	38
85	4	4	4	4	5	4	5	5	5	35
86	5	5	5	5	5	5	5	5	5	40
87	5	5	5	5	5	5	5	5	4	39
88	5	5	5	5	5	5	5	5	5	40
89	5	5	5	5	5	5	5	5	5	40
90	5	5	5	5	5	5	5	5	5	40
91	5	5	5	5	5	5	5	5	5	40
92	5	5	5	5	5	5	5	5	5	40
93	5	5	5	5	5	5	5	5	5	40
94	5	5	5	5	5	5	5	5	5	40
95	5	5	5	5	5	5	5	5	5	40
96	5	5	5	5	5	5	5	5	5	40
97	5	5	5	5	5	5	5	5	5	40
98	5	5	5	5	5	5	5	5	5	40
99	5	5	5	5	5	5	5	5	5	40



# Hasil Uji Statistik Diskeritif

## Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic
Kesadaran wajib pajak	99	31.00	40.00	36.0303	3.52094
pengetahuan, pemahaman	99	29.00	40.00	35.7778	3.60429
sanksi, denda	99	24.00	40.00	34.1010	3.94734
kualitas pelayanan fiskus	99	27.00	40.00	35.9293	3.71498
kepatuhan membayar pajak	99	33.00	40.00	37.9899	2.03287
Valid N (listwise)	99				

## Uji Validitas

### 1. Kesadaran Wajib Pajak

## Correlations

	kwp1	kwp2	kwp3	kwp4	kwp5	kwp6	kwp7	kwp8	Totalkwp
kwp1 Pearson Correlation	1	.792**	.683**	.642*	.629*	.571**	.554**	.641**	.863**
Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
N	99	99	99	99	99	99	99	99	99
kwp2 Pearson Correlation	.792**	1	.797**	.581*	.716*	.632**	.522**	.597**	.883**
Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
N	99	99	99	99	99	99	99	99	99
kwp3 Pearson Correlation	.683**	.797**	1	.374*	.557*	.484**	.418**	.392**	.737**
Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.000	.000	.000	.000	.000
N	99	99	99	99	99	99	99	99	99

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kwp4	Pearson Correlation	.642**	.581**	.374**	1	.413**	.606**	.403**	.668**	.740**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000		.000	.000	.000	.000	.000
	N	99	99	99	99	99	99	99	99	99
kwp5	Pearson Correlation	.629**	.716**	.557**	.413**	1	.435**	.674**	.498**	.774**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000		.000	.000	.000	.000
	N	99	99	99	99	99	99	99	99	99
kwp6	Pearson Correlation	.571**	.632**	.484**	.606**	.435**	1	.646**	.634**	.795**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000		.000	.000	.000
	N	99	99	99	99	99	99	99	99	99
kwp7	Pearson Correlation	.554**	.522**	.418**	.403**	.674**	.646**	1	.557**	.760**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000		.000	.000
	N	99	99	99	99	99	99	99	99	99
kwp8	Pearson Correlation	.641**	.597**	.392**	.668**	.498**	.634**	.557**	1	.790**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000		.000
	N	99	99	99	99	99	99	99	99	99
total kwp	Pearson Correlation	.863**	.883**	.737**	.740**	.774**	.795**	.760**	.790**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	99	99	99	99	99	99	99	99	99

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

#### 1. Pengetahuan dan Pemahaman

##### Correlations

	pp1	pp2	pp3	pp4	pp5	pp6	pp7	pp8	totalpp
pp1	1	.543**	.704**	.628**	.623**	.608**	.555**	.607**	.825**
		.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
		99	99	99	99	99	99	99	99



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pp2	Pearson Correlation	.543**	1	.580**	.496**	.496**	.478**	.598**	.409**	.742**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
	N	99	99	99	99	99	99	99	99	99
pp3	Pearson Correlation	.704**	.580**	1	.825**	.566**	.715**	.544**	.616**	.871**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.000	.000	.000	.000	.000
	N	99	99	99	99	99	99	99	99	99
pp4	Pearson Correlation	.628**	.496**	.825**	1	.476**	.646**	.510**	.518**	.797**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000		.000	.000	.000	.000	.000
	N	99	99	99	99	99	99	99	99	99
pp5	Pearson Correlation	.623**	.496**	.566**	.476**	1	.483**	.447**	.610**	.750**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000		.000	.000	.000	.000
	N	99	99	99	99	99	99	99	99	99
pp6	Pearson Correlation	.608**	.478**	.715**	.646**	.483**	1	.540**	.685**	.809**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000		.000	.000	.000
	N	99	99	99	99	99	99	99	99	99
pp7	Pearson Correlation	.555**	.598**	.544**	.510**	.447**	.540**	1	.550**	.751**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000		.000	.000
	N	99	99	99	99	99	99	99	99	99
pp8	Pearson Correlation	.607**	.409**	.616**	.518**	.610**	.685**	.550**	1	.787**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000		.000
	N	99	99	99	99	99	99	99	99	99
totalp	Pearson Correlation	.825**	.742**	.871**	.797**	.750**	.809**	.751**	.787**	1
p	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	99	99	99	99	99	99	99	99	99

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).



## 2. Sanksi Denda

### Correlations

		sd1	sd2	sd3	sd4	sd5	sd6	sd7	sd8	totalsd
sd1	Pearson Correlation	1	.865**	.874**	.902**	.856**	.856**	.884**	.758**	.943**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
	N	99	99	99	99	99	99	99	99	99
sd2	Pearson Correlation	.865**	1	.956**	.879**	.762**	.689**	.864**	.847**	.936**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
	N	99	99	99	99	99	99	99	99	99
sd3	Pearson Correlation	.874**	.956**	1	.923**	.803**	.729**	.841**	.859**	.951**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.000	.000	.000	.000	.000
	N	99	99	99	99	99	99	99	99	99
sd4	Pearson Correlation	.902**	.879**	.923**	1	.812**	.812**	.796**	.840**	.944**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000		.000	.000	.000	.000	.000
	N	99	99	99	99	99	99	99	99	99
sd5	Pearson Correlation	.856**	.762**	.803**	.812**	1	.909**	.873**	.758**	.909**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000		.000	.000	.000	.000
	N	99	99	99	99	99	99	99	99	99
sd6	Pearson Correlation	.856**	.689**	.729**	.812**	.909**	1	.791**	.688**	.866**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000		.000	.000	.000
	N	99	99	99	99	99	99	99	99	99
sd7	Pearson Correlation	.884**	.864**	.841**	.796**	.873**	.791**	1	.857**	.935**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000		.000	.000
	N	99	99	99	99	99	99	99	99	99
sd8	Pearson Correlation	.758**	.847**	.859**	.840**	.758**	.688**	.857**	1	.902**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000		.000
	N	99	99	99	99	99	99	99	99	99

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

[illegible]

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

### 3. Kualitas Pelayanan Fiskus

## Correlations

[illegible]



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kpf7	Pearson Correlation	.636**	.650**	.663**	.571**	.629**	.523**	1	.557**	.797**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000		.000	.000
	N	99	99	99	99	99	99	99	99	99
kpf8	Pearson Correlation	.548**	.692**	.631**	.593**	.500**	.528**	.557**	1	.781**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000		.000
	N	99	99	99	99	99	99	99	99	99
totalkpf	Pearson Correlation	.840**	.882**	.879**	.833**	.778**	.771**	.797**	.781**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	99	99	99	99	99	99	99	99	99

\*\* Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

#### 4. Kepatuhan Membayar Pajak

##### Correlations

	kmp1	kpm2	kmp3	kmp4	kmp5	kmp6	kmp7	kmp8	totalkmp
kmp1 Pearson Correlation	1	.270**	.550**	.220*	.242*	.448**	.172	.196	.670**
Sig. (2-tailed)		.007	.000	.028	.016	.000	.090	.052	.000
N	99	99	99	99	99	99	99	99	99
kpm2 Pearson Correlation	.270**	1	.244*	.634**	.126	.479**	.075	.231*	.644**
Sig. (2-tailed)	.007		.015	.000	.213	.000	.460	.021	.000
N	99	99	99	99	99	99	99	99	99
kmp3 Pearson Correlation	.550**	.244*	1	.220*	.340**	.450**	.168	.168	.673**
Sig. (2-tailed)	.000	.015		.028	.001	.000	.096	.097	.000
N	99	99	99	99	99	99	99	99	99
kmp4 Pearson Correlation	.220*	.634**	.220*	1	.220*	.430**	.253*	.168	.673**
Sig. (2-tailed)	.028	.000	.028		.028	.000	.012	.097	.000

[illegible]

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

\*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).





## Uji Reabilitas

### Kesadaran Wajib Pajak

#### Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	99	100.0
	Excluded <sup>a</sup>	0	.0
	Total	99	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

#### Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.913	8

### 2. Pengetahuan dan Pemahaman

#### Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	99	100.0
	Excluded <sup>a</sup>	0	.0
	Total	99	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

#### Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.911	8

### 3. Sanksi Denda

#### Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	99	100.0
	Excluded <sup>a</sup>	0	.0
	Total	99	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

#### Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.974	8

#### 4. Kualitas Pelayanan Fiskus

## Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	99	100.0
	Excluded <sup>a</sup>	0	.0
	Total	99	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

## Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.930	8

## 5. Kepatuhan Membayar Pajak

## Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	99	100.0
	Excluded <sup>a</sup>	0	.0
	Total	99	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

## Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.725	8

**Hasil Uji Hepotesi**  
**Uji Koefisien Determinasi**

## Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.737 <sup>a</sup>	.543	.523	1.40391

a. Predictors: (Constant), KPF, PP, SD, KWP



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA  
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية  
FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO. Box 1004 Telp. 0761-562051  
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: fekonsos@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.VII/PP.00.9/6172/2018  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Hal : Izin Riset

Pekanbaru, 08 Oktober 2018 M  
27 Muharram 1440 H

Kepada  
Yth. Kepala Kantor  
Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Provinsi Riau

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa salah seorang Mahasiswa Fakultas  
Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : M. Rama  
NIM. : 11473102208  
Jurusan : Akuntansi  
Semester : IX (Sembilan)

bermaksud mengadakan Riset dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul:  
**"Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro  
Kecil dan Menengah (UMKM) dalam Membayar Pajak Sesuai PP No 46  
Tahun 2013 pada Umkm di Kabupaten Indragiri Hilir"** Untuk itu kami mohon  
kiranya Saudara berkenan memberikan bantuan yang diperlukan kepada  
mahasiswa tersebut.

Demikianlah, atas bantuan dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

Dekan,

  
Dr. Drs. H. Muk. Sa'id HM, M.Ag, MM  
NIP. 19620512-198903 1 003

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





## SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

NAMA : MASRUL  
JABATAN : MANAGER  
PERUSAHAAN : CV. RAJAWALI GRAHAM MOTOR YAM  
ALAMAT : JL. KAPTEN MUKTAR

Dengan ini menerangkan bahwa:

NAMA : M.RAMA  
NIM : 11473102208  
FAK / JUR : EKONOMO DAN ILMU SOSIAL / AKUNTANSI  
UNIVERSITAS : ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

Adalah benar telah melakukan penelitian dalam rangka penulisan skripsinya yang berjudul: **FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) DALAM MEMBAYAR PAJAK SESUAI PP NO. 46 TAHUN 2013 PADA UMKM DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR (INHIL)** dan telah pula membahas materi hasil penelitiannya dengan kami.

Tembilahan, 5 November 2018  
CV. Rajawali Graham Motor Yam

  
(MASRUL)  
Manager



## SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

NAMA : TS. LAIZA ANITA  
JABATAN : BRANCH MANAGER  
PERUSAHAAN : CV. BERKAH TIGA  
ALAMAT : JL. DIPONEGORO

Dengan ini menerangkan bahwa:

NAMA : M.RAMA  
NIM : 11473102208  
FAK / JUR : EKONOMO DAN ILMU SOSIAL / AKUNTANSI  
UNIVERSITAS : ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

Adalah benar telah melakukan penelitian dalam rangka penulisan skripsinya yang berjudul: **FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) DALAM MEMBAYAR PAJAK SESUAI PP NO. 46 TAHUN 2013 PADA UMKM DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR (INHIL)** dan telah pula membahas materi hasil penelitiannya dengan kami.

Tembilahan, 3 November 2018

CV. Berkah Tiga

(TS. LAIZA ANITA)  
Manager

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

NAMA : KIWI YULIASTUTI  
 JABATAN : BRANCH MANAGER  
 PERUSAHAAN : CV. PERMATA NAGUZA  
 ALAMAT : JL. DIPONEGORO

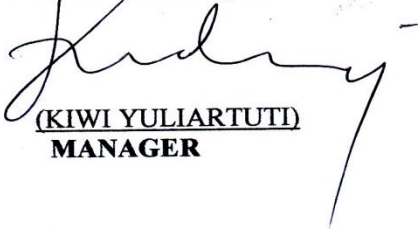
Dengan ini menerangkan bahwa:

NAMA : M.RAMA  
 NIM : 11473102208  
 FAK / JUR : EKONOMO DAN ILMU SOSIAL / AKUNTANSI  
 UNIVERSITAS : ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

Adalah benar telah melakukan penelitian dalam rangka penulisan skripsinya yang berjudul: **FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) DALAM MEMBAYAR PAJAK SESUAI PP NO. 46 TAHUN 2013 PADA UMKM DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR (INHIL)** dan telah pula membahas materi hasil penelitiannya dengan kami.

Tembilahan, 27 Oktober 2018

CV. Permata Naguza

  
 (KIWI YULIARTUTI)  
 MANAGER

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





## SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

NAMA : MULIA LIM  
JABATAN : MANAGER  
PERUSAHAAN : TOKO OBAT KASMAS  
ALAMAT : JL. ST. SYARIF QASIM

Dengan ini menerangkan bahwa:

NAMA : M.RAMA  
NIM : 11473102208  
FAK / JUR : EKONOMO DAN ILMU SOSIAL / AKUNTANSI  
UNIVERSITAS : ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

Adalah benar telah melakukan penelitian dalam rangka penulisan skripsinya yang berjudul: **FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) DALAM MEMBAYAR PAJAK SESUAI PP NO. 46 TAHUN 2013 PADA UMKM DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR (INHIL)** dan telah pula membahas materi hasil penelitiannya dengan kami.

Tembilahan, 29 Oktober 2018

Toko Obat Kesmas

(MULIA LIM)  
Manager

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.